PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BERBASIS EKONOMI SYARIAH

(STUDI EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASINYA DI DESA SYARIAH CUKIR, KABUPATEN JOMBANG)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh
Fatkur Huda
NIM. F0.2.4.16.087

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fatkur Huda

NIM : F0.2.4.16.087

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

FBA3AFF347323384

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Fatkur Huda

PERSETUJUAN

Tesis Fatkur Huda ini telah disetujui

Pada tanggal 29 Agustus 2018

Oleh

Pembimbing

Dr. Hj. Fatmah, ST. MM.

NIP. 197507032007012020

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis Fatkur Huda ini telah diuji

Pada tanggal 8 Nopember 2018

Tim Penguji:

1. Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Ketua) .....
2. Dr. Khotib, M.Ag. (Penguji) .....
3. Dr. Hj. Fatmah, ST., MM. (Penguji) .....

Surabaya, 8 Nopember 2018

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatkur Huda
NIM : F02416087
Fakultas/Jurusan : Magister Ekonomi Syariah
E-mail address : hudafatkur@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah (Studi Evaluasi Terhadap Implementasinya Di Desa Cukir Kabupaten Jombang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Desember 2018

Penulis

(Fatkur Huda)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Huda, Fatkur. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah di Desa Syariah Cukir Kabupaten Jombang. Tesis. Program Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah merupakan salah satu kegiatan pengembangan desa mandiri yang digagas oleh Bank Indonesia (BI) berkerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Dalam rangka mensukseskan program tersebut maka perlu adanya kajian yang mendalam dalam pelaksanaanya. Desa Syariah Cukir Kabupaten Jombang merupakan salah satu yang menjadi *pilot projek*program Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah. Berbekal dengan kondisi ekonomi yang sudah terbilang cukup mandiri, desa Syariah Cukir merupakan kawasan industri dan juga pesantren, salah satunya adanya Pesantren Tebuireng yang merupakan salah satu pesantren tertua di Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan maksud mampu menjelaskan secara dalam terkait model pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah dan potensi-potensi yang ada pada desa yang dijadikan sebagai *pilot projek*. Hasil dari penelitian ini adalah penerjemahan 5 (lima) indikator yang telah ditetapkan oleh Bank Inonesia(BI) terkait penilaian desa mandiri tersebut. Dengan penerjemahan kedalam konsep yang dirujuk dari beberapa refrensi maka ditemukan konsep desa mandiri berbasis ekonomi syariah yang memiliki nilai aktifitas berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada aspek sosial-ekonomi dan keagamaan, desa Syariah Cukir telah mengaktualisasikan kegiatan ekonomi dan interaksi sosial yang memperhatikan nilai-nilai keagaaman dalam hal ini Islam. Kondisi tersebut dipengaruhi dengan adanya Pesantren Tebuireng yang menjadi basis aktifitas masyarakat sekitar. Disisi lain di desa Syariah Cukir sendiri telah berdiri lembanga keuangan syariah yang dengan kemudahanya dapat diakses masyarakat dalam berbagai kepentingan termasuk pembiayaan usaha masyarakat.

Kata Kunci: *Desa, Mandiri, Ekonomi, Syariah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian 10

F. Penelitian Terdahulu 10

G. Metodologi Penelitian 12

H. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kajian Pustaka 19
1. Pemberdayaan Masyarakat 19
2. Studi Empiris Sosial-Ekonomi-Keagamaan 21
B. Landasan Teori 26
1. Konsep Pemberdayaan 26
2. Konsep Kesejahteraan 29
3. Konsep Efektifitas 32
4. Konsep Desa Mandiri 41
5. Etika Islam dalam Aktivitas Ekonomi 48
6. Konsep Pembangunan Desa (Pendekatan Ekonomi Pembangunan Syariah) 51
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BERBASIS EKONOMI SYARIAH DI DESA CUKIR KABUPATEN JOMBANG 55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 55
1. Kondisi Sosial 55
2. Kondidi Ekonomi 59
3. Kondidi Keagamaan 63
B. Gambaran Umum Program Pengembangan Desa Mandiri BerbasisEkonomi Syariah 66
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 71
A. Model Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. SDM dan Kondisi Sosial 71
2. Lingkungan Biotis dan Infrastruktur 75
3. Kelembagaan Masyarakat..... 78
4. Potensi Ekonomi..... 82
5. Akses Keuangan 85
B. Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah
di Desa CukirKabupaten Jombang..... 87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 95
A. Kesimpulan..... 95
B. Implikasi Teoritik 96
C. Keterbatasan Studi..... 97
D. Rekomendasi 97
DAFTAR PUSTAKA 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Luas tanah menurut penggunaanya 56

Tabel 3.2. Masalah kesejahteraan sosial 57

Tabel 3.3. Kesejahteraan keluarga 58

Tabel 3.4. Data penduduk menurut mata pencaharian 60

Tabel 3.5. Lembaga ekonomi desa 61

Tabel 3.6. Pendidikan Formal Keagamaan 64

Tabel 4.7. Pendapatan perkapita 88

Tabel 4.8. Jumlah nasabah LKS 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Indikator kesejahteraan dalam Islam 30

Gambar 2.2 Dua aspek yang menjadi prasyarat kesejahteraan 31

Gambar 2.3 Keberdayaan desa pada bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan 42

Gambar 2.4. Kausalitas teoritis UU 6/2014 tentang Desa 47

Gambar 3.1. Diagram Tingkat Pendidikan 57

Gambar 4.1. Cakupan pendampingan desa 74

Gambar 4.2. Orientasi lingkungan dan infrastruktur 78

Gambar 4.3. Membangun kapasitas warga 79

Gambar 4.4. Langkah pengorganisasian lembaga masyarakat 80

Gambar 4.5. Tata kelola desa 82

Gambar 4.6. Contoh detailing pilar akses keuangan 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan 117

Lampiran 2. Surat penelitian 118

Lampiran 3. Data Informan 121

Lampiran 4. Press relis kegiatan ISEF 2017 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pandangan bahwa desa[1] (atau sebutan lain: *gampong, nagari, kampung, marga,* dan sebagainya) sering kali terabaikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebuah kenyataan yang sulit terbantahkan. Desa dan masyarakatnya masih berada pada kondisi serba kekurangan dan tertinggal dibanding kondisi masyarakat kota di berbagai aspek kehidupan, khususnya sosial/ekonomi. Kota dipandang lebih sejahtera daripada desa dari ukuran ekonomi.[2] Adalah suatu kenyataan bahwa kemiskinan masih membelenggu sebagian warga masyarakat di negeri ini. Kemiskinan seolah akrab dengan keterbelakangan dan kebodohan yang merupakan permasalah yang tiada habis untuk dibicarakan.[3]

---

[1] Pengertian tentang desa cukup beragam, karena itu beberapa tokoh sosiologi pedesaan dan antropologi memberikan pandangan yang beragam tentang desa. Menurut koentjaraningrat (1984), desa dimaknai sebagai suatu komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Pemaknaan desa menurut pandangan ini menekankan pada cakupan, ukuran atau luasan dari sebuah komunitas, yaitu cakupan, ukuran atau luasan yang kecil.
Pengertian lain tentang desa dikemukakan oleh Hayami dan Kikuchi (1987) bahwa desa sebagai unit dasar kehidupan kelompok terkecil di Asia. Dalam konteks ini "desa" dimaknai sebagai suatu "desa alamiah" atau dukuh tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial dan ekonomi. Pemaknaan terhadap desa dalam konteks ini ditetaknkan pada aspek ketergantungan sosial dan ekonomi di masyarakat yang direpresentasikan oleh konsep-konsep penting pada masyarakat desa, yaitu cakupan yang bersifat kecil dan ketergantungan dalam bidang sosial dan ekonomi (ikatan-ikatan komunal). Lihat Muhammad Zid, Ahmad Tarmiji Alkhudri, *Sosiologi Pedesaan Teoritis dan Perkembangan Kajian Pedesaan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 3-4.

[2]Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa, Perbandingan UU No.5 Tahun 1979, UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004 serta Perspektif UU No.6 Tahun 2004*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 1.

[3]Mubyarto, dkk, *Duapuluh Tahun Penelitian Pedesaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada anggapan bahwa pembangunan nasional justru menciptakan kesenjangan antara desa dan kota. Pembangunan yang bias perkotaan semakin memperbesar *disparitas* antara kota dan desa. Negara berkembang, termasuk Indonesia, lebih mengonsentrasikan pembangunan ekonomi pada sektor industri untuk mengejar pertumbuhan. Akibatnya, sektor lain seperti sektor pertanian yang berada di pedesaan dan menjadi mata pencaharian utama masyarakat desa dikorbankan. Konsekuensinya, pembangunan hanya terpusat di kota dan kepentingan masyarakat desa dikesampingkan.[4]

Selama ini pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota. Sumber daya ekonomi yang tumbuh di kawasan desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga desa kehabisan sumber daya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk desa ke kota. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan, kemiskinan dan keterbelakangan yang senantiasa melekat pada desa.[5]

Hal tersebut menjadikan tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan prasarana dan tingkat produktivitas pertanian, pendidikan, dan derajat kesehatan, memperlihatkan daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Padahal sekitar 65% jumlah penduduk hidup di daerah pedesaan, sedangkan jumlah yeng menetap di daerah perkotaan hanya kurang lebih 35%.[6]

Ketua Pokja Industri Desa Komite Ekonomi dan Industri Nasional Aries Mufti mengatakan bahwa saat ini desa di Indonesia masih didominasi desa

---

[4]Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, 1.
[5]Ditjen PMD, *Direktorat Pemerintah Desa dan Keluarahan "Naskah Akademik RUU Tetang Desa"*, (Jakarta: Depdagri, 2007), 16.
[6]Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertinggal dan sangat tertinggal (63,82 persen). Total angkatan kerja di desa yang saat ini berjumlah 58,4 juta orang juga didominasi lulusan sekolah dasar. Yakni, 57,78 persen. Faktor rendahnya pendidikan di pedesaan tersebut mengakibatkan tingginya persentase penduduk miskin. Hingga saat ini penduduk miskin di pedesaan mencapai 13,96 persen, lebih tinggi daripada penduduk miskin di perkotaan yang hanya 7,43 persen. Kondisi tersebut membuat banyak penduduk desa yang lebih memilih tinggal di kota. Pada 2016, jumlah penduduk Indonesia di pedesaan hanya 46 persen. Hal ini menjadi potret pedesaan saat ini adalah miskin, migrasi, dan rendahnya pendidikan yang kebanyakan merupakan lulusan SD. Meski pemerintah telah mengucurkan dana hingga Rp 47 triliun pada 2016, pendapatan warga desa justru turun 1 persen. Angka kemiskinan pun stagnan di angka 14 persen. Dana desa yang disalurkan itu naik 127 persen, tapi pendapatan warga malah turun.[7]

Potret-potret masalah yang berlangsung di desa memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan desa yang berlaku sejak dari dahalu hingga kini pascareformasi terbukti belum menjadi sebuah sistem yang mantap. Kompleksitas persoalan tersebut menjadi bukti masih banyaknya persoalan seputar pelaksanaan desentralisasi, khususnya penyelenggaraan pemerintahan desa.

Walaupun pemberdayaan terhadap desa sudah cukup lama akan tetapi sampai saat ini masih dijumpai persoalan yang melilit masyarakat pedesaan dan membutuhkan solusi penyelesaian segera. Program yang saat ini pemerintah turunkan kedesa menunjukkan kebijakan pemerintah yang hanya sekedar bersifat

[7]https://www.jawapos.com/read/2017/11/08/167414/kembangkan-desa-berbasis-ekonomi-syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

top down, karena secara konsep lahir dari konsepsi pejabat diluar pihak desa, sehingga sering mengabaikan konteks lokal desa dan pemerintah cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek kebijakan pemerintah semata tanpa melibatkan sebagai subjek yang menjalankan. Tjondronegoro (1978) dalam Nata Irawan mengatakan bahwa tantangan dari pendekatan *top down* terhadap desa-desa di Indonesia ialah meningkatkan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan makna yang dikembangkan oleh masyarakat, bukan oleh elit desa.[8]

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan pemerintah melalui program-program. Namun upaya tersebut belum mampu memanen hasilnya, kalaupun ada yang berjalan tetapi masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Beberapa persoalan yang menjadi kendala keberhasilan adalah sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Satu pendekatan baru yang dapat diterapkan melihat fakta sebaran ekonomi Islam yang semakin meningkat maka perlu adanya sebuah pendekatan pengembangan desa berbasis ekonomi Islam.

Perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini sungguh menggembirakan, disadari atau tidak, sistem ekonomi konvensional yang berpaham kapitalisme, yang selama ini menjadi kiblat masyarakat modern, telah banyak merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat. Filosofi yang dikedepankan adalah mengumpulkan modal (kapital) yang sebesar-besarnya agar bisnis terus

[8]Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang.[9] Sebagai konsekuensinya, dalam praktiknya, mereka menerapkan sistem bunga yang dibebankan kepada siapa pun yang menggunakan jasa mereka.[10]

Tidak demikian halnya dengan sitem ekonomi yang disetting dari langit (wahyu) yang diarsiteki langsung oleh Allah SWT. Hanya saja sistem ekonomi *ribawi* lebih dulu dikenal dan telah lama merasuki dunia bisnis di kalangan masyarakat, akhirnya mereka terbiasa dengan sistem itu. Sedangkan sistem ekonomi *nonribawi* ini belum banyak dikenal di kalangan mereka.[11] Jika dibandingkan dengan negara sesama rumpun melayu, Malaysia misalnya, negara Indonesia dapat dikatakan masih jauh tertinggal dalam menerapkan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu itu. Nampaknya untuk mengubah persepsi yang sudah mengakar di benak Masyarakat tidak mudah. Masih butuh waktu untuk menggeser persepsi dari tingkat intelektual (rasional), menuju ke emosional, dan akhirnya bertransformasi ke spiritual.[12]

Melihat fakta sepanjang tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur diperkirakan mencapai 5,5-5,9%, membaik dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 5,5%. Perbaikan permintaan domestik yang bersumber dari konsumsi swasta dan pemerintah, diperkirakan menjadi penopang utama perbaikan

---

[9]Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 1, ter. Soerojo dan Nastangin, (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 4.
[10]Tarek El-Diwany, *The Problem With Interest: Sistem Bunga dan Permasalahnya*, ter. Amdiar Amir (Jakarta:Akbar Media Eka Sarana, 2003), 25.
[11]Muhammad Djakfar, *Wacana Teologi Ekonomi; Membumikan Titah di Ranah Bisnis dalam Era Globalisasi*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2015), 8.
[12]Hermawan Kertajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung:Mizan, 2006), xxvi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertumbuhan ekonomi tersebut. Meskipun demikian, kinerja ekspor diperkirakan cenderung melambat dibandingkan tahun sebelumnya.[13]

Jawa Timur menjadi daerah yang memiliki kekuatan ekonomi berbasis syariah sangat tinggi, daerah yang begitu kental dengan dunia pesantren dan sebanyak 35,1 juta penduduk Jawa Timur adalah muslim, angka tersebut merupakan 97,2 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Jawa Timur. Sehingga dalam rangka memberdayakan kekuatan ekonomi tersebut Jawa Timur melalui kegiatan ISEF 2017 menggagas pengembangan desa berbasis ekonomi syariah.[14]

Dalam kesempatan tersebut ada empat desa di Jawa Timur yang dipilih sebagai kandidat *pilot project* desa berbasis ekonomi syariah. Empat desa tersebut adalah Desa Karanganyar, Kabupaten Bondowoso; Desa Syariah Cukir, Kabupaten Jombang; Desa Bendosari, Kabupaten Malang; dan Desa Panjerejo, Kabupaten Tulungagung. Program tersebut merupakan kerja sama antara Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).

Dalam penetapan desa syariah BI memberikan lima pilar penilaian dalam penetapan desa percontohan dalam pengembangan desa berbasis ekonomi syariah yaitu Sumber Daya Manusia dan kondisi sosial, lingkungan biotis dan infrastruktur, kelembagaan masyarakat, potensi ekonomi dan yang terkahir akses keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai upaya berkelanjutan maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang mendalam dengan menggabungkan kajian teoritis dan lapangan mengenai konsep-konsep pengembangan desa berbasis ekonomi syariah di desa syariah Cukir Kabupaten Jombang. Penelitian lapangan

[13]http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/jatim/Pages/KEKR-Provinsi-Jawa-Timur-Agustus-2017.aspx
[14]ttps://www.jawapos.com/read/2017/11/08/167414/kembangkan-desa-berbasis-ekonomi-syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diperlukan dalam rangka meninjau langsung prospek atau keunggulan pada proses pelaksanaan program tersebut, sehingga kedepan mampu dikembangkan pada desa-desa lain sebagai desa berbasis ekonomi syariah.

B. IDENTIFIKASI DAN BATASAN MASALAH

Dari rumusan masalah yang dipaparkan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Desa merupakan suatu wilayah yang sering terabaikan oleh perhatian pemerintah. Sehinga memerlukan perhatian khusus dalam penyelesaian kesenjangan-kesenjangan di dalamnya.
2. Pembangunan yang bias perkotaan semakin memperbesar disparitas antara kota dan desa, hal ini yang mempengarui terjadinya urbanisasi dari desa ke kota, sehingga angkatan kerja muda di desa terserap ke kota dan menjadikan desa sebagai suatu tempat yang tertinggal dan laju ekonominya melambat.
3. Rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan prasarana dan tingkat produktivitas pertanian, pendidikan, dan derajat kesehatan di pedesaan menjadi salah satu faktor desa tertinggal dalam hal perkembanganya dibidang ekonomi.
4. Besarnya angkatan kerja di desa yang mencapai 58,4 juta orang juga didominasi lulusan sekolah dasar yakni, 57,78 persen. Merupakan suatu kondisi yang berbalik lurus dengan laju ekonomi yang pesat dan memerlukan sumber daya manusia yang mempuni.
5. Perberdayaan masyarakat desa masih belum berjalan efektif karena masyarakat masih menggantungkan uluran tangan dari pemerintah pusat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini tidak menjadi solusi karena masyarakat lebih cenderung duduk tanpa kreatifitas dalam menerima bantuan pemerintah.

6. Merubah pemahaman masyarakat mengenai sistem ekonomi yang ribawi nampaknya masih terkendala, untuk mengubah persepsi yang sudah mengakar di benak Masyarakat tidak mudah. Masih butuh waktu untuk menggeser persepsi dari tingkat intelektual (rasional), menuju ke emosional, dan akhirnya bertranformasi ke spiritual.
7. Jawa Timur menjadi daerah yang memiliki kekuatan ekonomi berbasis syariah sangat tinggi, daerah yang begitu kental dengan dunia pesantren menjadi modal yang baik dalam mengambangankan desa berbasis ekonomi syariah.

Setelah melakukan identifikasi permasalahan yang ada maka penulis merumuskan batasan masalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penelitian ini hanya akan mengupas bagaimana model pengembangan desa berbasis ekonomi syariah yang BI dan IAEI programkan di Jawa Timur dengan menunjuk 4 desa sebagai Pilot Projek dalam hal ini penulis mengambil Desa syariah Cukir Kabupaten Jombang sebagai tempat penelitian.
2. Menganalisa persoalan sosial, ekonomi dan keagaman sebagaimana kekuatan dalam melaksanakan suatu program berbasis ekonomi syariah pada pengembangan pedesaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. RUMUSAN MASALAH

Kurang lebih 1 tahun program Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah dideklarasikan oleh BI dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). pada ISEF 2017. Rentang waktu tersebut masih terbilang muda untuk misi besar dari program pengembangan tersebut, karena hasilnya belum dapat diamati secara menyeluruh. Tetapi yang perlu dianalisa dalam pola pengembangan dan pendampingan adalah optimalisasi model pengembangan serta program-program yang dilakukan sudah mampu dirasakan manfaatnya bagi warga desa dalam semarak kegiatan ekonomi syariah. Berdasarkan alur tersebut, penulis mencoba mencari jawaban atas rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana konsep pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah?
2. Bagaimana model penerapan pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah beserta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaanya di Desa Syariah Cukir Kabupaten Jombang?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk menjawab hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep pengembangan desa berbasis ekonomi Syariah.
2. Mengetahui model penerapan pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah beserta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaanya di Desa Syariah Cukir Kabupaten Jombang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis: Dapat menjadi acuan teori model pengembangan desa berbasis ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis: Dapat menjadi sumbangan saran kepada BI dan IAEI dalam rangka menjalankan program pengembangan desa berbasis ekonomi syariah. Termasuk daerah lain yang belum bisa menyelesaikan persoalan ekonomi. Serta mendayagunakan sumber-sumber pendanaan dari pemerintah (dana desa), maupun I-CSR yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah dan penyaluran dana ZISWA agar dapat dikelola secara produktif.

F. PENELITIAN TERDAHALU

Dalam rangka mengungkapkan sebuah pemahaman yang relevan maka diperlukan adanya kajian dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian sebelumnya yang dituangkan dalam sebuah jurnal Matra Pembaruan yang berjudul "Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan di Kabumen dan Pekalongan" yang ditulis oleh Arif Sofianto yang menyebutkan bahwa dana desa memberikan satu kntribusi dalam pengembangan infrastruktur terutama jalan sehingga memberikan pengaruh terhadap kelancaran lalu lintas, lingkungan yang baik, harga lahan meningkat dan usaha perdagangan meningkat. Namun dalam hal ini dana desa belum mampu menyentuh secara langsung program pengembangan/pemberdayaan masyarakat tentang pengembangan ekonomi. Hal ini menjadi satu intrumen dimana program pengembangan desa berbasis ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah dapat memanfaatkan dana desa sebagai salah satu sumber pendanaan dan pengembangan program.[15]

Penelitian selanjutnya juga dituangkan dalam Jurnal Al-Iqtishadi yang ditulis oleh Mahbub Junaidi dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan (BUMDES) Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Syariah Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi" yang menyebutkan bahwa pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo telah berjalan dengan baik, namun masih memiki suatu kendala pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang baik serta infrastruktur yang kurang memadai. Beberapa kendala lainya adalah pelaporan masih menggunakan manual, dukungan pemerintah kurang dalam hal pemasaran produk, hubungan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam rangka pengembangan BUMDes dan pendampingan yang kurang optimal.[16]

Berikutnya penelitian dalam jurnal Al-Tahrir yang dilakukan oleh Thohir Yuli Kusmanto[17] dkk. Dengan judul Gerakan Sosial Ekonomi Islam di Pedesaan: Studi Kasus peran Baitul Maal Wat Tamwil di Kabupaten Sragen yang menyatakan bahwa BMT menjadi sarana yang efektif dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam hal ini yakni pengembangan kawasan pedesaan,

[15]Arif Sofianto, Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Mayarakat di Kabumen dan Peklaongan, *Matra Pembaruan* Vol. 1 No.1 (2017), 23-32.
[16]Mahbub Junaidi, Evaluasi Pelaksanaan (BUMDES) Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Syariah Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Bayuwangi, *Al-Iqtishadi*, Vol.2, No.1 (Oktober 2015), 111-122
[17]Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, IPB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertumbuhanya menjadi lebih mudah dan meluas dalam masyarakat karena kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang dinamis dan terbuka.[18]

Merujuk pada penelitian di atas maka dalam penelitian pengembangan desa berbasis ekonomi syariah yang akan mencoba menyentuh pada aspek yang lebih luas yakni melihat bagaimana model pengembangan dan strategi pendampingan SDMnya, sehingga penelitian ini mencoba menyajikan laporan pelaksanaan pengembangan desa secara komperehensip. Sehingga mampu memberikan satu rujukan dalam pelaksanaan pengembangan desa berbasis ekonomi syariah.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami masyarakat, masalah atau segala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam, data disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.[19] Pendekatan ini digunakan penulis dikarenakan subyek kajian penelitian tesis ini adalah mengkaji bagaimana model pengembangan desa berbasis ekonomi syariah dan memotret pelaksanaannya di Desa Syariah Cukir Kabupaten Jombang.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*literatur research)* yang selanjutnya dilakukan penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan analisis kualitatif. Karena itu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa pengumpulan informasi dari literatur yang mengungkap konsep model

[18]Thohir Yuli Kusmanto, Gerakan Sosial Ekonomi Islam di Pedesaan: Studi Kasus peran Baitul Maal Wat Tamwil di Kabupaten Sragen, *Al-Tahrir*, Vol. 16, No. 1 (Mei 2016), 223-245.
[19]Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi III*, (Yogyakarta: Pilar Media, 1996), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan desa dan informasi yang berbentuk keterangan-keterangan dan bukan berupa angka-angka. Analisis kualitatif dianggap lebih tepat dalam penelitian ini, sebab analisis ini diharapkan dapat lebih memungkinkan untuk mengembangkan penelitian ini agar bisa mendapatkan pemahaman mendalam.

Sesuai dengan tujuannya, penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta untuk memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya. Pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai ketertarikan dari partisipan, dan melalui penguraian "pemaknaan partisipan" tentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa. Pemaknaan partisipan meliputi perasaan, keyakinan, ide-ide, pemikiran, dan kegiatan dari partisipan. Beberapa penelitian kualitatif diarahkan lebih dari sekedar memahami fenomena tetapi juga mengembangkan teori. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi. Strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap seperti foto, rekaman, dan lain-lain.[20]

Dalam mengungkap semua fenomena dan makna secara alamiah tersebut, penelitian menggunakan metode deskriptif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Lexy J. Moleong bahwa kebanyakan penelitian kualitatif sangat kaya dan sarat dengan deskripsi. Peneliti ingin memahami kontek dan melakukan analisis yang holistik tentu saja perlu dideskripsikan.[21]

---

[20]Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 94-95.
[21]Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Subyek Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Syariah Cukir Kabupaten Jombang. Desa ini merupakan salah satu *Pilot projek* dalam Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah yang dilaksanakan oleh BI dan IAEI bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (Akademisi).

3. Sumber Dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka,[22] melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat.[23] Adapun data kualitatif meliputi:

a. Data tentang gambaran umum mengenai objek penelitian
b. Data lain yang tidak berupa angka

Adapun jenis-jenis dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumbar data primer dan sumber data sekunder.Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari informan yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut *key member* yang memegang kunci sumber data penelitian ini, karena informan benar-benar tahu dan terlibat dalam kegiatan pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah ini. Adapun informan dalam pengambilan data primer adalah BI selaku pemilik program, Ikatan Ahli Ekonomi IslamJawa Timur selaku penanggungjawab lapangan, kepala Desa beserta perangkat desa, Tokoh yang ada di Desa dan UMKM. Dalam penentapan sampel tersebut dinamakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan

[22]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), 66.
[23]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kualitatif dan kuantitatif*, 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan design penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segi lapisan populasi sehingga dapat dianggap cukup representatif.[24]

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka dibutuhkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik atau cara yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.[25] Teknik ini penulis ambil karena fokus penelitian yang diambil adalah suatu program kegiatan pengembangan yang mana berhubungan langsung dengan masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu perlu adanya suatu observasi yang mendalam terhadap kegiatan tersebut.

b. Wawancara

Dalam buku Sugiyono, Esterberg mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melaluitanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam satu topik tertentu.[26] Dalam hal ini informan yang menjadi kunci adalah Bapak Taufiq Salah (BI), Dr. Hj. Fatmah (Perwakilan IAEI), Bapak Sutomo (Kepala Desa Cukir).

---

[24]S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 99.
[25]Nana Syaodih Sukmadinata, 220.
[26]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 316

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.[27] Pada penelitian ini penulis menggambil data dari beberapa dokumen dari BI dan dari Desa Syraiah Cukir.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berpijak kepada prasyarat Sradley yang dikutip oleh Sugiyono, berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahapan penelitia menurut Spadley adalah, bahwa proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci "*key informant"* yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membukakan pintu kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara.

Selanjutnya, perhatian peneliti pada obyek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara. Tujuan penelitian deskriptif menurut Alson dan Wowles[28] adalah untuk mencari jawaban apa dari sebuah fenomena sosial yang lebih mendalam dibandingakan penelitian eksploratori.

---

[27]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 231.
[28]Alston Margareth dan W. Bowles, *Research For Social Workers An Introducting To Methads*, (Australia: Allen&Unwim, 1998), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Ditinjau dari segi tempat penelitian, maka penelitian ini hanya dilakukan pada desa yang merupakan salah satu *pilot projek* pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah oleh BI dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab ini akan diuraikan secara singkat latar belakang desa mandiri berbasis ekonomi syariah sebagai objek penelitian, Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA. Pada bab ini diuraikan berbagai kajian kepustakaan dan kajian teori yang menjadi dasar pemikiran dalam menguraikan konsep pengembangan desa mandiri, dari aspek religiusitas, sosial dan ekonomi.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF. Pada bab ini akan diuraikan gambaran mengenai kondisi objek penelitian pada aspek keagamaan sosial dan ekonomi. Serta memberikan gambaran secara umum tentang program pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini akan mengupas tiga sub bab. Pada sub bab yang pertema akan membahas pengembangan desa berbasis ekonomi syariah sehingga dapat dilihat bagaimana konsep dan strategi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankanya. Berikutnya akan dideskripsikan keadaan sebelum dan sesudah adanya program pengembangan. Yang terakhir akan menemukan hasil bagaimana efektifitas dari pengembangan desa berbasis ekonomi syariah serta hambatan dalam pelaksanaanya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN. Pada bab ini akan disajikan kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis data, yakni kesimpulan tentang bagaimana strategi dan efektifitas pengebangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah di Desa Syariah Cukir Kabupaten Jombang tersebut. Sedangkan pada bagian akhir akan disajikan beberapa rekomendasi tentang langkah-langkah yang relevan dalam pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Pemberdayaan Masyarakat

Sukmaniar[1] dalam tesisnya menguraikan tingkat efektifitas pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar pasca Tsunai tahun 2004. Sukmaniar mengunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif dengan menganalisis tingkat kondisi pemberdayaan masyarakat pasca Tsunami sebelum dan sesudah PPK digunakan analisis scoring dan efektifitasnya digunakan analisis deskriptif. Hasil penelitianya memberikan indikator tidak efektifnya pemberdayaan masyarakat tersebut. Oleh karena itu maka perlu adanya proses penyiapan masyarakat secara intensif berupa peningkatan motivasi (tahapan efektif), peningkatan wawasan pengetahuan (tahapan kognitif) dan peningkatan keterampilan (tahapan psikomotorik) untuk menunjang peran masyarakat dalam pembangunan (tahapan konatif). Selain itu kurang efektifnya pemberdayaan masyarakat tersebut disebabkan kondisi pemukiman belum pulih, terbatasnya aktivitas masyarakat dalam mengelola pembangunan dan jiwa sosial yang rendah sehingga perlu adanya upaya percepatan pemulihan kondisi pemukiman dan peningkatan peran pimpinan/ fasilitator desa untuk menumbuhkan motivasi masyarakat untuk bekerjasama.

[1]Sukmaniar, "Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar" (Tesis—Unversitas Diponegoro, Semarang, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafar Supardjan[2] dalam tesisnya membahas proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi BAIK Program Pembiayaan Mikro Khusus Ibu Rumah Tangga miskin pedesaan di Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-Analitik. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa program pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Koperasi BAIK sejalan dengan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor namun belum sepenuhnya dipahami sebagai proses dalam konteks teoritiknya. Adapun faktor-faktor kendala yang mempengarui proses pemberdayaan masyarakat tersebut adalah a) faktor penghambat: penyaluran pembiayaan usaha produktif belum maksimal sehingga menambah beban hutang anggota yang mengakibatkan tingkat keaktifan anggota menurun; b) Faktor pendukung: partisipasi anggota relatif tinggi untuk diberdayakan.

Ni Putu Indriyani dkk[3] dalam karyanya menganalisis pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat studi di Desa Dauh Peken Kec. Tabanan. Kab. Tabanan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data didapat melalui data primer dan sekunder dengan unit analisisnya adalah pemberdayaan masyarakat, sedangkan penentuan informanya dilakukan denganpurposive sampling. Selanjutnya dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan 5 (lima) indikator di bidang

[2]Syafar Supardjan, "Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pembiayaan Mikro (Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro pada Anggota Koperasi Baytul Ikhiar, Kabupaten Bogor-Jawa Timur)" (*Tesis*—Universitas Indonesia, Jakarta, 2012).
[3]Ni Putu Indriyani dkk, "*Analisis Pembangunan Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat*", Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi dan 2 (dua) indikator di bidang lingkungan dari (Parsons, dalam Aprillia 2015). Adapun 5 (lima) indikator di bidang pemberdayaan ekonomi/usaha:

a. Pemilihan komoditas dan jenis usaha;
b. Pengelolaan SDM dan pengembangan karir
c. Pengembangan jaringan kemitraan
d. Manajemen logistik dan finansial
e. Pengembangan sarana dan prasaranan

Dari kelima indikator di atas hanya indikator pemilihan komoditi dan jenis usaha yang menunjukkan hasil cukup baik dalam pemberdayaan ekonomi. Sedangkan pada bidang pemberdayaan lingkungan yakni:

a. Lingkungan fisik
b. Lingkungan Sosial

Pada indikator ini hanya pada indikator lingkungan fisik (bank sampah) yang menunjukkan hasil baik, sedangkan pada lingkungan sosial (partisipasi) belum menunjukkan hasil yang baik.

2. Studi Empiris Sosial-ekonomi-keagamaan

Studi Max Weber[4] mengenai Etika Protestan dan semangat kapitalisme yang dikaji pada 1904-1905 tetap aktual untuk dijadikan referensi teoritis dalam studi sosiologi ekonomi, khususnya integrasi nilai-nilai agama dalam konteks kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Perkembangan kapitalisme di dunia Barat berkaitan erat dengan dua hal ini: rasionalitas instrumental dan etika protestan (terutama Calvinis). Max Waber mengonsepsikan empat bentuk rasionalitas, yaitu

[4]Max Weber, *The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism*, (London dan New York: Routledge, 1992), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

traditional rationality, value rationality, affective rationality, dan *purpossive rationality*. Menurut Weber, *purpossive rationality* adalah bentuk paling tinggi, karena kemunculannya bersifat instrumental dengan pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan.

Rasionalitas instrumental mengajarkan tindakan individu dan masyarakat agar tepat guna, efesien dan efektif mencapai tujuan utama yang ingin dicapai dalam kehidupan. Hal demikian mengantarkan masyarakat Barat masuk dalam konteks "peradaban industrial modern kapitalistik" dengan mengedepankan tindakan rasional ekonomi. Selain itu terintegrasinya nilai-nilai keagaman dalam bentuk etika protestan merupakan "penyuluh" perkembangan kapitalisme modern. Menurut Weber, sikap hidup lebih menonjolkan "tapa-brata keduniawian" *(this wordly asceticism)*adalah devosi keagamaan yang kemudian membentuk "etika individu." Itu sebabnya, penganut protestan (terutama Calvinis) bisa tampil sebagai pekerja yang tekun, sabar, hidup hemat, gemar menabung, dan memiliki kualitas kesalehan personal.

Poin penting yang dapat ditarik dari kerangka pemikiran ini adalah tautan antara tradisi budaya masyarakat *(purpossive rationality)*dan nilai-nilai ajaran keagamaan (etika protestan) menjadi pemicu perkembangan kapitalisme modern di Barat. Berlangsungnya reformasi keagamaan di Barat terpatri dengan kuat dalam konsepsi sekte-sekte puritan. Doktrin kesalehan duniawi *(asceticism)*yang terbawa keluar dari "rumah-rumah peribadatan" menuju konteks kehidupan keseharian, yang kemudian mendominasi bangun moralitas keduniawian, secara efektif berperan dalam melahirkan kekuatan-kekuatan ekonomi modern.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebanyakan pelaku ekonomi dibolehkan menumpuk kekayaan berlimpah sepanjang dibingkai oleh pertanggungjawaban moral yang tinggi.[5]

Bahkan menurut Ignas Kleden, semangat kapitalisme bukan hanya terdapat pada etika Protestan saja, tetapi sangat muncul dari sistem nilai budaya dan agama lain seperti dicontohkan dalam "motif perkembangan kapitalisme baru" di beberapa Negeri Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan Taiwan) dan Asia Tenggara (Singapura dan Malaysia).[6]

Pasca penelitian Max Weber dalam Tesisnya tersebut merangsang para cendekiawan sosial untuk melakukan studi lanjutan. Hingga bermunculan pelbagai asumsi teoritis bahwa pertautan nilai-nilai keagamaan dengan aktivitas ekonomi kelompok masyarakat tertentu merupakan suatu keniscayaan. Dalam hal ini Richard Sosis,[7] menjelaskan jalinan kuat nilai-nilai keagamaan dengan terbangunnya kepercayaan bisnis. Ia menyimpulkan bahwa penganut agama yang sama dapat membangun kepercayaan (*trust)* diantara sesama mereka. Kecendrungan ini ditemukan pada kelompok pedagang intanorang Yahudi ultra-ortodoks yang melakukan aktivitas perdagangan di berbagai kota besar Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Serikat, yang mengandalkan kepercayaan untuk menjalin hubungan kerja sama dengan mitra dagang mereka. Menurut Sosis,

---

[5]Arin Setiyowati, "Analisis Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan Terhadap Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) Pasca Penutupan Lokalisasi Dupak Bangunsari Dan Tambak Asri Surabaya Tahun 2014" (Tesis - - UGM, Jogjakarta, 2014), 45.

[6]Ignas Kleden, *Kapitalis, Spiritualitas Keagamaan, dan Etos Ekonomi: mengenang 100 Tahun The Protestan Ethic And The Spirit of Capitalism Max Weber",* (Makalah tidak diterbitkan, Jakarta, 2005)

[7]Richard Sosis, " Does Religion Promote Trust? The role of signaling, reputation, and punishment," dalam Interdisiplinary Journal Of Research On Religion 1, 2005, dalam M Lutfi Malik, *Etos Kerja, Pasar dan Masjid: Transformasi Sosial-Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan*, (Jakarta: LP3ES, 2013), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomena demikian juga dapat ditemukan di kalangan pedagang Muslim Magribi di Wilayah Afrika Utara. Begitu pula dengan hasil studi Roberto Barro dan Joshua Mitchell.[8] Mereka mengonsepsikan bahwa nilai-nilai agama bisa mendorong mobilitas sosial-ekonomi masyarakat. Keyakinan agama yang dimiliki individu atau kelompok tertentu dapat memunculkan nilai-nilai seperti etos kerja, kejujuran, kehidupan hemat dan lain-lain yang berkaitan dengan keagamaan dan dapat mendorong individu dan kelompok penganut agama tertentu bekerja produktif dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Beberapa ilmuwan seperti Clifford Geertz, Lance Castle, dan Mitsuo Nakamura, melakukan pelbagai kegiatan penelitian di Indonesia dalam rangka membuktikan "kesakihan" tesis Max Weber. Dalam penelitian tersebut mengulas kelompok-kelompok muslim yang mengembangkan usaha ekonomi perdagangan. Hasil studi mereka memperlihatkan bahwa kaum santri yang mencitrakan kekuatan sosial-ekonomi cukup potensial untuk menjadi pekerja tekun, hidup sederhana, rajin menabung, dan menghargai hasil kerja individu, merupakan purwarupa kalangan "muslim modernis". Menurut Geertz[9], sebagian besar pemuka komunitas usaha ekonomi perdagangan (tembakau, tekstil dan pertokoan) di Mojokuto berasal dari kaum muslim *"reformis-puritan"*. Karena itu, reformis Islam dalam wujudnya sebagai kaum muslim puritan menjadi doktrin mayoritas para saudagar. Moral etik seperti ini muncul pada diri santri reformis-modernis

[8]Robert Barro dan Joshua Mitchell, *Relgious Faith and Economic Growth: What Metters Most-Belief or Belonging?* (Washington DC: The Heritage Foundation Center For Religion and Civil Society, 2004), dalam Arin Setiyowati, Tesis - - UGM, Jogjakarta, 2014.
[9]Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Diterjemahkan oleh Aswab Mahasin, (Jakarta:Pustaka Jaya, 1983).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang justru membentuk etos ekonomi modern digerakkan oleh semangat kewirausahaan Islam.

Sama halnya Lence Castle[10] yang melakukan penelitian di Kudus, Jawa Tengah dan Mitsuo Nakamura[11] di Kotagede, Yogyakarta. Menelaah kemunculan kelompok-kelompok wirausaha muslim modernis yang terbilang cukup sukses. Golongan santri muncul sebagai pemilik sekaligus pemasok tanaman tembakau atau perusahaan-perusahaan rokok besar di Kudus. Sedangkan di Kotagede muncul wirausahawan dari kelompok santri Muhammadiyah yang memiliki basis kekuatan usaha dalam mengembangkan ekonomi modern. Namun sebagain besar santri yang wirausahawan tersebut, baik di Kudus maupun di Kotagede mengalami kemunduran karena melulu mengandalkan model kewirausahawan individu. Mereka tidak mampu bersaing dengan para pengusaha Tionghoa yang tampil lebih responsif dan inovatif dalam menyongsong perubahan: pengusaha Tionghoa tidak sekedar mengandalkan usaha keluarga tetapi juga berhasil mengembangkan institusi ekonomi modern yang lebih kompleks.

Dalam kesempatan yang berbeda peneliti Mulyadi[12], menganalisis munculnya kelompok 'muslim-puritan' di Jawa awal abad ke-20 yang dipelopori oleh Ahmad Dahlan (1868-1923). Menurutnya, pencetusan gerakan modernis Islam di Indonesia ini dapat dikategorikan sebagai purwarupa "muslim-calvini".

---

[10]Lence Castle, *Religion, Politics and Economic Behavior in Java: The Kudus Cigarette Industry*, (New Haven: Southest Asia Studies, Yale University Press, 1967).

[11]Mitsuo Nakamura, *Bulan Sabit Terbit Di Atas Pohon Beringin: Studi Tentang Pergerakan Muhammadiyah Di Kotagede Sekitar 1910-2010*, Edisi Revisi Ditambah Bagian Kedua, (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017).

[12]Sukidi Mulyadi, Ahmad Dahlan Sebagai Muslim Calvinis, "Dalam Degradasi Ekonomi Muhammadiyah, 'Sebuah Gugatan, Dalam *Equilibrium Jurnal Ekonomi Dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 3 (2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Dahlan dikenal memiliki sikap asketis tinggi sekaligus semangat kewirausahaan. Sejak dini, anak seorang kyai dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta dengan basis pendidikan pesantren ini sudah mengamalkan ajaran Islam secara konsisten. Dan satu hal bahwa Ahmad Dahlan juga dikenal sebagai seorang wirausahawan cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wiraswasta yang cukup menggejala dalam masyarakat Yogyakarta. Artinya begitu kuat sikap asketis Ahmad Dahlan telah membentuk disiplin diri, terintergrasi dengan baik dalam karakter kepribadiannya: sikap jujur, rajin, hemat, suka membantu, militan dalam melakukan pembaruan Islam, serta mendorong transformasi sosial keagamaan dan ekonomi masyarakat.

3. Kebangkitan Ekonomi Kaum Santri

Resistensi dalam bidang ekonomi tak melulu dilakukan oleh para pengusaha atau mereka yang berada dalam jargon kalangan Islam modernis. Tetapi juga di kalangan pesantren. Kalangan pesantren dalam sejarah awal imperialsme Belanda merupakan institusi terdepan melakukan perlawanan.Dan pada masa imperealisme modern yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda juga melakukan perlawanan.

Pada tahun 1918, KH.Wahab mendirikan *Nahdlatul Tujjar* (kebangkitan pedagang). Nahdlatul Tujjar ini berisi perkumpulan jaringan niaga pedagang muslim di tiga wilayah julur strategis (Jombang,Kediri,Surabaya), di mana KH.Hasyim Asy'ari sebagai ketuanya dan KH.Wahab sebagai bendahara sekaligus penasehat hukum.Adapun letar belakang berdirinya Nahdalatul Tujjar menurut Greag Fealy sebagai respon atas wilayah-wilayah ekonomi para Kiai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang di rebut modernis.Sebagaimana ia katakan, Ekspansi yang cepat oleh organisasi-organisasi modernis ke berbagai kota kecil di Jawa Timur dan Jawa Tengah mengancam basis ekomoni banyak pesantren dan ekomoni keluarga Kiai yang mengandalikannya. Kaum modernis terutama berhasil merekrut pedagang kaya dan tuan tanah yang sebelumnya telah menjadi pendukung material dan keluarga Kiai.[13]

Dari keterangan Greg fearly tersebut dapat dianalisa bahwa gerakan kaum modernis atau para pembaharu Islam,tidak hanya sekedar menyerang amaliah kaum tradisi dengan isu TBC (Takhayul,Bid'ah dan Khurafat), tetapi juga merambah terhadap kepentingan ekomoni para Kiai tradisional. Diliar Noer menggambarkan;

> Yang menyakitkan perasaan kaum tua juga adalah bahwa kepanjen di di Jawa Timur telah mulai menerima fikiran-fikiran Muhammadiyah. Di sini banyak dijumpai pedagang batik yang mempunyai hubungan dagang dengan Yogya dan Solo. Untuk keperluan dagang dan untuk keperluan organisasi serikat Islam, KH.Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah yang juga menjadi penasehat central serikat Islam, sering mengunjungi kepanjen di mana ia tidak berdiam diri. Buah fikirannya mudah di terima orang karena ia memang dihormati ditempat tersebut. Tetapi seorang alim lain yang berasal diri Kudus, KH Asnawi yang juga mempunyai hubungan dagang dengan orang orang Kepanjen (beberapa orang memang berasal dari kudus), mulai mencela fikiran-fikiran Muhammadiyah dan mengajak orang-orang Kepanjen untuk berbuat seperti itu pula. Kota Kepanjen menjadi tempat perebutan pengaruh antara kalangan Muhammadiyah dan kaum tua.[14]

Dari gambaran Deliar Noer bisa ditangkap fakta bahwa kaum modernis mulai merambah merekrut para pedagang-pedagang yang sedia awalnya adalah

---

[13]Freg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdatul Ulama-Ulama*, (Yogyakarta: LKIS, 1997), xiii.
[14]Delier Noer, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 1995), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partner dari ulama-ulama pesantren. Dengan beralih kiblatnya para pedagang, maka dikhawatirkan akan merobohkan penopang ekonomi yang bisa jadi selama itu mendukung dan penyuplai dana untuk pesantren dan kaum tradisional umumnya.Karenanya mau tidak mau para ulama dan pengusaha pendukung Islam tradisional,bersatu membentuk sebuah perkumpulan untuk selain menghadang laju serangan kaum medernis,juga penyuplai bagi kesejahteraan para Kiai pondok pesantren dan juga gerakan organisasi di bawah latar Islam tradisi.

Tetapi bila merujuk pada ceramah KH.Hasyim Asy'ari pada saat pembentukan *Nahdlatul Tujjar*,sebagaimana diabadikan oleh KH.Wahab yang dimuat oleh Jarkom Fatwa,bahwa berdirinya *Nahdlatul Tujjar* adalah sebagai respon atas problem problem sosial yang semakin akut,yakni malasnya umat muslim jawa,merosotnya kepedulian anak bangsa terhadap masa depan bangsa,menurunnya minat kaum terpelajar,tindakan terajut pada para ulama serta kemalasan ulama dalam kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi,dan perbudakan dari orang-orang kaya yang bodoh atau pengusaha yang Dzalim.[15]

Jadi, berdirinya *Nahdlatul Tujjar* bila mencermati ceramah KH.Hasyim Asy'ari,tidaknya semata-mata dikarenakan reaksi dari gerakan ulama pembaru,tetapi adalah jawaban atas multikomplek persoalan yang dihadapi oleh umat Islam,dalam hal ini ulama pesantren yang cenderung abai dalam urusan ekonomi,terlebih dengan keterpurukan ekomoni,maka motor gerakan untuk membendung arus penjajah dari Belanda tidak mungkin akan berhasil.

[15]Jarkom Fatwa, *Sekilas Nahdlatut Tujjar*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beridirinya *Nahdlatut Tujjar* adalah sebuah seruan agar umat Islam tradisi bangkit dalam bidang ekonomi. Tercatat ada 45 anggota yang bergabung dalam *Nahdlatut Tujjar*. Dari masing-masing anggota terkumpul modal 1.175 gulden. Dari modal yang terkumpul, atas seruan KH.Hasyim Asy'ari agar usaha yang di jalankan terkuat di bidang pertanian. Selain karena faktor kompetensi para anggota yang lebih memiliki pengalaman dibidang pertanian, menurut Jarkom Fatwa, agar bisnis yang dikembangkan tidak terpengaruh dengan pasar dunia.[16] Meski seruan KH.Hasyim Asy'ari dalam berdagang lebih difokuskan pada bidang pertanian, namun dalam sejarah berikutnya, *Nahdlatut Tujjar* bergerak juga dalam bidang perkebunan dan komoditas sandang, seperti menjual buah-buahan, kopi, minyak goreng dan lainnya.

Organisasi ini dalam menerapkan manajemen sudah seperti pengelolaan manajemen organisasi modern. Ada pembagian struktur organisasi dan pembagian kerja layaknya sebuah perusahaan. Selain itu, konsep investasi usaha telah dikenal dalam bentuk sederhana, yang di era sekarang dikenal sebagai *profit share*. Dalam evaluasi perkembangan bisnis, *Nahdlatut Tujjar* mendirikan *Darun Nadwah*, semacam balai pertemuan. Di forum tersebut di mana anggota dari *Nahdlatut Tujjar* melaksanakan pertemuan empat kali dalam setahun.[17]

Meski demikian, dalam perkembangan *Nahdlatut Tujjar* mengalami pasang surut. Pada era pra-berdirinya NU, *Nahdlatut Tujjar* mengalamin kerugian dalam perdagangan. Hal ini menurut Jarkom Fatwa disebabkan pada tahun berdirinya, ia berada dalam himpitan jatuhnya pertanian di satu sisi, dan di sisi

[16]Ibid, 21.
[17]Ibid, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain tumbuhnya diversifikasi lahan pertanian menjadi perkebunan.[18] Hal ini diperparah dengan kondisi kota Surabaya yang menunjukan penururan pada ekomoni makronya. Meningkatnya Batavia sebagai kota industri meninggalkan Surabaya, menjadi penyebab lainnya. Pun halnya perubahan keseimbangan industri, yang tidak hanya berpusat di Jawa Timur tetapi telah beralih ke Jawa Barat dan Sumatera.

Dengan penguatan bidang ekomoni, terbukti dikemudian ulama-ulama pesantren berhasil membuat gerakan-gerakan perlawanan. KH.Wahab Hasbullah dikemudian mendirikan madrasah dan penguatan gerakan perlawanan. Berkat dukungan H.O.S Tjokrominito, Raden Pandji, Soendjoto, KH.Abdul Kahar mau menerima dan mendukung berdirinya sekolah atau madrasah tersebut. KH. Abdul Kahar, seorang saudagar kaya yang kemudian menjadi penanggung jawab pembangunan gedung sekolah tersebut menggugah partisipasi masyarakat Surabaya khususnya para dermawan untuk turut serta dalam pembangunan sekolah tersebut. Atas berbagi dukungan warga tersebut, maka berdirilah sebuah gedung bertingkat di Surabaya (kampung kawatan gang IV) yang kemudian dikenal sebagai sekolah *Nahdlatut watan* pada tahun 1916 M.[19] Sekolah ini mendapat *Rechtpersoon*, pengakuan resmi berbadan hukum, dengan susunan pengurus KH.Abdul Kahar sebagai Direktur, KH.Abdul Wahab Chasbullah sebagai Pimpinan Dewan Guru dan KH.Mas Mansur Sebagai Kepala Sekolah dibantu KH. Ridwan Abdullah.[20]

---

[18]Ibid, 58.
[19]*Majalah Bangkit*, Edisi 03/TH.IV/ Maret 2015, 6.
[20]Kiai Ridwan Abdullah lahir di Kampung Carikan Gang I, Kelurahan Alun-alun Contong, Kacamatan Bubutan, Surabaya, pada tahun 1884. Pendidikan dasarnya diperoleh di sekolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak itu, *Nahdlatul Wathan*dijadikan markas penggemblengan para pemuda. Mereka dididik untuk menjadi pemuda yang menguasai ilmu agama, memiliki rasa cinta tanah air serta memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Pendidikan membangun nasionalismenya, dapat dilihat dari nama madrasahnya yakni *Nahdlatul Wathan*yang berarti "kebangkitan tanah air" Dari nama itu, sudah bisa ditafsirkan visi misi apa yang hendak dilaksanakan oleh KH.Wahab Hasbullah.

Dalam kegiatan belajar-mengajar, menurut KH.Maimun Zubair yang pernah menjadi murid *Nahdlatul Wathan,* para murid diharuskan terlebih dulu menyayikan lagu perjuangan dalam bahasa Arab sebelum pelajara dimulai[21]. Lagu tersebut dibuat oleh KH.Abdul Chalim, seorang Kiai asal Majalengka, yang turut menjadi pengajar di madrasah tesebut. Syair yang dibaca penuh dengan pekik perjuangan, kecintaan terhadap tanah tumpah darah serta kebencian terhadap penjajah.

Usaha pembelajaran dengan suntikan nasionalisme tersebut menjadi bukti dari cita-cita murni berdirinya madrasah tersebut adalah untuk membebaskan pribumi dari belenggu kolonial Belanda. Madrasah tersebut bervisi membebaskan jiwa *Inlander* yang telah menggerogoti kaum pribumi dengan suntikan pekik nasionalime yang digelorakan terus menerus setiap hari melalui syair itu.

Belanda. Di tempat itu Kiai Ridwan mendapatkan pengetahuan teknik dasar menggambar dan melukis. Kiai Ridwan tergolong murid yang pintar, sehingga ada orang Belanda yang ingin mengadopsinya. Belum selesai sekolah di situ, orangtuanya kemudian mengirimnya ke Pesantren Buntet di Cirebon. Ayah Kiai Ridwan, Abdullah, memang bersal dari Cirebon, Kiai Ridwan adalah anak bungsu. Sumber, *Majalah Al-Kisah No.03 tahun VI 28 Januari 2008*.

[21]*Aula*, 03 Tahun XXXVIII/Maret 2016, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tahun 1916 hingga 1918, terjadi perkembangan madrasah *Nahdlatul Wathan* dengan sangat pesat. Namun demikian, pendirian *Nahdlatul Wathan* belumlah memuskan dan menyelesaikan kegelisahan KH.Wahab akan nasib pesantren dan ulama pembela madzhab lainnya. Sebab perkembangan terakhir yang diamati oleh KH.Wahab, sebagai ulama pendukung madzhab sedang menjadi sasaran atas serangan-serangan para ulama yang mengatasnamakan dirinya sebagai ulama pembaruan. Sedang orang pesantren sendiri masih belum bayak yang menyadari akan dampak buruk bagi keberlangsungan eksistensi *Ahlu sunnah waljamaah* ke depannya. Maka KH.Wahab kemudian melakukan pendekatan kepada KH.Ahmad Dachlan,[22] pengasuh pesantren Kebon dalem-Surabaya. Untuk mendirikan forum *Taswirul Afkar*. Maka pada tahun 1918 forum *Taswirul Afkar* ini dikhususkan sebagai area diskusi berlangsung 3 kali seminggu. Pesertanya tidak hanya sebatas santeri, tetapi juga banyak Kiai-Kiai yang ikut serta di dalamnya.

Forum diskusi *Taswirul Afkar* berkembang pesat. Gaungnya meluas. Ia begitu populer hingga ke berbagai daerah. Sehingga pesertanya tidak tebatas dari Surabaya dan sekitarnya saja, akan tetapi juga berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Madura. Sejumlah tokoh pernah terlibat dalam diskusi ini termasuk

[22]Kiai Dahlan bernama lengkap Ahmad Dahlan IBN Muhammad Ahyad, terlahir pada 13 Muharram 1303 H yang bertepatan dengan tanggal 30 Oktober 1885 di Kebondalem Surabaya, sebuah wilayah yang berada di Kecamatan Simokerto, sebelah timur makam Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Kiai Dahlan merupakan putra ke 4 dari 6 bersaudar. Pendidikan beliau dimulai dari ayahnya sendiri, KH. Muhammad Ahyad, pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Kebondalem Surabaya. Dalam urusan pembiayaan, Kiai Dahlan bersama pimpinan lainya mendirikan **Syirkatul Amaliyah, yaitu semacam koperasi yang sahamnya dijualbelikan kepada para anggota** Taswirul Afkar. Langkah ini merupakan gerakan untuk membantu pembiayaan kebutuhan harian, apalagi tidak adanya subsidi dari pemerintah Hindia-Belanda untuk perkumpulan tersebut. Untuk lebih lengkap lihat Wasid Mansyur, *Biografi KIAI AHMAD DAHLAN AHYAD*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahmad Hasan, orang Singapura, yang kemudian menjadi pemimpin Persis di Bandung. Forum diskusi ini kemudian memanas, manakala tema-tema diskusi mengerucut pada persoalan *Khilafiah*. Sehingga pada langkah berikutnya, muncul bibit-bibit perpecahan di antara para pendukung madzhab dan pendukung anti-Madzhab.

Pada tahun 1919, forum *Tashwirul Afkar* di bawah komando KH.Ahmad Dahlan Ahyad ini, mengembangkan diri ke ranah pendidikan. Mereka mendirikan madrasah yang kemudian hari diberi nama madrasah *Taswirul Afkar*. Madrah *Taswirul Afkal* mula-mula didirikan di dekat masjid Ampel Surabaya, tetapi setelah tempatnya tidak tertampung oleh banyaknya jumlah siswa yang belajar di madrasah itu,maka lokasi madrasah dipindah ke jalan pegirian 238 Surabaya.

Mulanya Madrasah *Taswiru Afkar* ini kesulitan memperoleh izin dari pemerintah Belanda.karenanya berbagai usahanya dilakukan. Usaha yang dikemudian membuahkan hasil dengan terbitnya *Recthpersoon* dari pemerintah Hindia Belanda itu adalah dengan menginduk kepada organisasi Surya Sumirat. Surya Sumirat adalah organisasi yang telah disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan keanggotan dari perhimpunan Budi Utomo. Kerenanya sebutan pada *name bord* pada madrasah itu dulu adalah *Surya Sumirat afdeling Taswiru Afkar*.[23]

Madrasah *Taswiru Afkar* tersebut semakin hari semakin berkembang. Puluhan dan bahkan ratusa anak di Surabaya bagian utara itu menjadi murid Madrasah *Taswiru Afkar*. Ketertarikan masyarakat terhadap Madrasah *Taswiru*

[23]Wasid Mansyur, *Biografi Kiai Ahmad Dahlan* Ahyad, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Afkar ini disebabkan madrasah ini menggunakan sistem berjenjang dengan memberi materi umum tanpa meninggalkan pembelajaran ala pesantren. Menurut Wasid, madrasah *Taswiu Afkar* terdiri dari enam jenjang kelas, yakni dua jenjang *sifr awal* (nol-A), dan *sifr tsanani* (nol-B) serta jenjang kelas satu hingga empat.[24] Bagi para pemula, yakni jenjang *sifr*, kurikulum yang diterapkan adalah menulis dan menyusun kalimat arab, dan membaca al-Quran. Sedang pada jenjang berikutnya siswa difokuskan menguasai ilmu *Tajwid, nahwu sarf*, ilmu hitung dan ilmu keagamaan lainnya. jenjang kelas empat, siswa diberi tambahan pelajaran, yakni menguasai ilmu matematika dan geografi.

Forum *Taswiru Afkar* selain mendirikan madrasah, juga membuat forum Dakwah *Taswiru Afkar*. Forum Dakwah *Taswiru Afkar* menghimpun beberapa *da'i* yang bertugas untuk melakukan dakwah di *mushala* ke *mushala* dan dari *masjid* ke *masjid*. Para *da'i* ini memberikan pengajian-pengajian dalam rangka menyebarkan dan mengokohkan ajaran *ahlussunah wal jamaah*. Strategi ini cukup efektif, sebab langsung berhadapan dengan,masyarakat. Meraka mendialogkan ajaran dengan realitas masyarakat. Keluhan keluhan permasalahan yang dihadapi masyarakat dijawab oleh para *da'i* yang diterjunkan. Beberapa *da'i* yang tercatat, yang terlibat dalam Forum Dakwah *Taswiru Afkar* adalah KH.Ahmad Dahlan Ahyad, KH.Ghufron, KH.Zein, KH.Nur, KH.Dahlan (Kertosono), KH.Abdul Majid dan KH.Chamim Syahid.[25]

Untuk membiayai semua oprasional progam *Taswiru Afkar*, KH.Ahmad Ahyad mendirikan koperasi yang di beri nama ***syirkatul Amaliyyah***, yaitu

[24]Ibid, 44.
[25]Ibid, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semacam koperasi yang sahamnya dijualbelikan kepada para anggota *Taswiru Afkar*.[26]

Selain mendirikan madrasah *Nahdlatul Wathan* sebagai penggemlengan nasionalisme dan *Taswiru Afkar* sebagai kawah candramuka para intelektual muslim dalam mensikapi problem sosial, KH.Wahab juga mendirikan *Ta'mirul Masjid*, yaitu suatu badan yang mengurusi masalah-masalah masjid, Berkaitan dengan *Ta'mirul Masjid,* Andre Feillard menyatakan "Akan tetapi, kaum tua tetap berjuang. Pada tahun yang sama, mereka meningkatkan kegiatan kemasjidan dengan membentuk suatu badan untuk mengurusi masalah-masalah masjid yaitu *Ta'mirul Masjid*"[27]

Bisa jadi, upaya KH.Wahab tidak ingin *kecolongan* bahwa masjid-masjid dibawah keta'miran para KiaiIslam tradisi akan direbut oleh Islam modernis. Karennya, pendirian Persatuan Ta'mir Masjid itu penting Khususnya dalam pendampingan permasalahan-permasalahan masjid yang berhaluan Islam tradisi.

Pada tahun 1926, pada puncaknya,ulama ulama pesantren berhasil membentuk organisasi Nahdlatul Ulama. Organisasi inilah yang dikemudian menjadi salah satu motor penggerak berdirinya negara Indonesia.

[26]Ibid, 45
[27]Ibid, 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. LANDASAN TEORI

1. Kosep Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *"empowerment"* yang secara harfiah bisa diartikan sebagai "pemberian kekuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan *(power).*[28]Istilah pemberdayaan menurut Kartasmita dalam Falilah merupakan upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masayarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah yang positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities)* yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya.[29]

Menurut Pranarka dan Moeljarto dalam Amalia, konsep pemberdayaan pada dasarnya merupakan sebuah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara strukturalis, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, international, maupun dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukanya konsep pemberdayaan (*empowerment).* Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada

---

[28]Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung:Humaniora, 2008), 82.
[29]Muhammad Nizar, "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) di Masjid Syarif Hidayatullah Karangploso Malang", *Malia,* Vol. 8, No. 1 (Desember 2016), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentukpenumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.[30]

Pandangan Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Mardi Yatmo Hutomo[31], kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu:

a. *To give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain;
b. *To give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki dua unsur tadi, kewenangan dan kapasitas. Kondisi tersebut juga sering disebut masyarakat kurang berdaya atau *powerless*, sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya

[30]*Ibid*, 44.
[31]Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi; Tinjauan Teoritik dan Imlementasi*, (Naskah No. 20, Juni-Juli 2000).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Hal itu yang dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupan tidak sejahtera.[32]

Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan atau *empowerment*. Menurut pendapat Korten (1987) dalam Soetomo (2015), memahami *power* tidak cukup dari dimensi distributif akan tetapi juga dari dimensi generatif. Dalam dimensi distributif, berdasarkan terminologi personal, *power* dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Menurut pendapatnya, sebagai dasar pemahaman pengertian pemberdayaan dalam pembangunan, *power* dalam dimensi generatif justru lebih penting. Suatu kelompok hanya akan memperoleh tambahan atau peningkatan *power* dengan mengurangi *power* kelompok lain. Kelompok yang bersifat *powerless* akan memperoleh tambahan *power*atau *empowerment*, hanya dengan mengurangi *power* yang ada pada kelompok *powerholders.*[33]

Melalui proses pemberdayaan, negara harus memberikan sebagaian kewenangannya atau sebagaian powernya kepada masyarakat. Dalam kenyataanya, negara tidak selalu secara sukarela bersedia untuk mengurangi sebagaian kewenangannya atau powernya guna diberikan kepada masyarakat. Untuk keperluan tersebut, maka dalam pemberdayaan masyarakat sering dikenal pula institusi yang mengembangkan misi untuk memberikan advokasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang posisinya marginal dan tidak berdaya.

---

[32]Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat; Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 88.
[33]Ibid, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep pemberdayaan mulai menjadi dirkursus pembangunan, ketika orang mempertanyakan makna pembangunan. Di Negara-negara sedang berkembang wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan memunculkan disinteraksi social, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa.

2. Konsep Kesejahteraan

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan mampu lahir kesejahteraan. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui sinergitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growt with equity* betul-betul dapat direalisasikan.[34] Namun demikian, konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam, bergantung pada perspektif apa yang digunakan. Dalam konteks ini maka filosofi kesejahteraan sebagaimana yang dinyatakan dalam Qur'an surat Quraisy: 1-4 merupakan salah satu konsep yang layak untuk mendapatkan perhatian.

لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ ۝١ إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ ۝٢ فَلۡيَعۡبُدُواْ رَبَّ هَٰذَا ٱلۡبَيۡتِ ۝٣
ٱلَّذِيٓ أَطۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وَءَامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۭ ۝٤

Artinya: " *(1) Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (2) (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas*[35]*, (3) Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah Ini*

[34]Ibid, 28.

[35]Orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri-negeri yang dilaluinya. Ini adalah suatu nikmat yang amat besar dari Allah kepada mereka. Oleh Karena itu, sewajarnyalah mereka menyembah Allah yang Telah memberikan nikmat itu kepada mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Ka'bah).(4) Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." [36]

Jika merujuk pada ayat tersebut di atas, maka konsep kesejahteraan ini memiliki empat indikator utama, sebagaimana gambar berikut;

Gambar 2.1
Indikator Kesejahteraan dalam Islam[37]

Keempat indikator tersebut adalah sistem nilai Islami, kekuatan ekonomi di sektor riil (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, serta keamanan dan keterlibatan sosial.

Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat diraih apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik dapat diwujudkan secara nyata. Kerena itu, membangun kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik, merupakan prasyarat utama bagi tercapainya kondisi kesejahteraan masyarakat dan bangsa.[38]

---

[36]At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi per kata dan Terjemahan per kata*, (Kota Bekasi; Cipta Bagus Segara, 2012), 62
[37]Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat; Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, 28
[38]*Ibid*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.2
Dua aspek yang menjadi prasyarat kesejahteraan

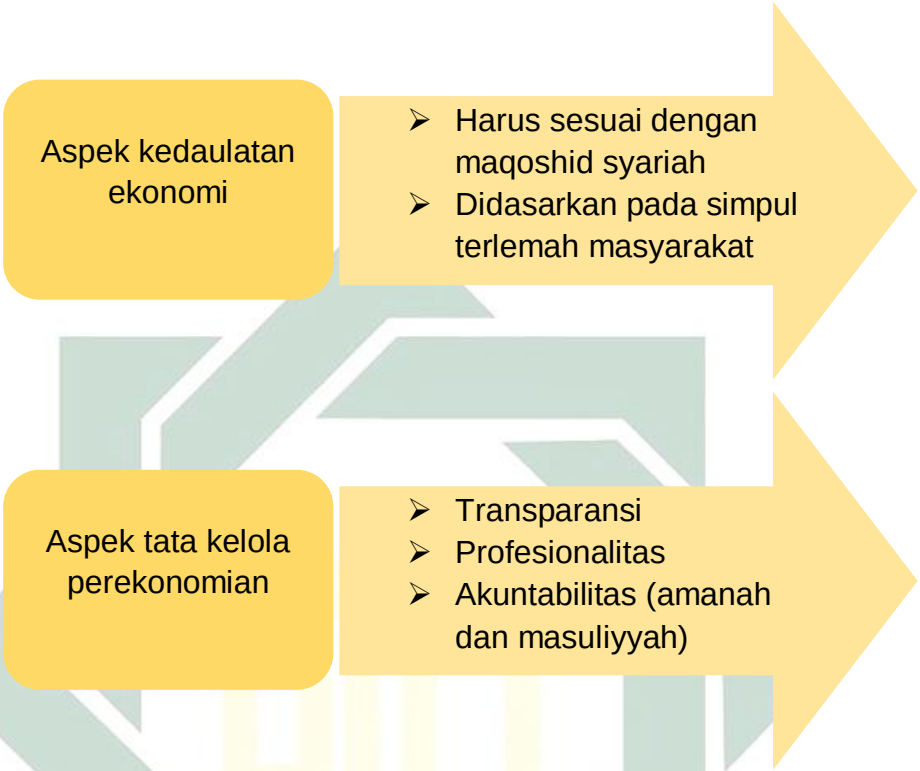

Dalam pandangan ajaran Islam, penegakan kedaulatan ekonomi merupakan sebuah keniscayaan. Kedaulatan ekonomi ini adalah hal yang sangat esensial dan fundamental bagi setiap bangsa.[39] Kedaulatan ekonomi sangat menentukan kedaulatan sebuah bangsa, akankah bangsa tersebut akan mudah didikte oleh kepentingan suatu golongan tertentu maupun tidak. Sebagai suatu jalan dalam penegakan kedaulatan ini adalah merupakan kebijakan ekonomi yang berbasis pada konsep *maslahah.*

3. Konsep Efektifitas

Termilogi efektifitas tidak asing lagi dalam dunia manajemen, efektifitas menjadi pengendali tujuan dari suatu organisasi atau institusi tertentu.

[39]*Ibid*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Definisi Efektifitas

Menurut Subagyo[40] efektifitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Tingkat efektifitas program dalam hal ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Apabila realisasi program mencapai presentase antara 1-50% dari target dapat digolongkan tingkat efektifitas rendah, sedangkan apabila realisasi program berada pada kisaran 51-100% dari target termasuk mempunyai efektifitas tinggi.

Pendapat lain adalah yang disampaikan Suti[41] Efektifitas adalah ketepatan suatu tindakan atau kesempurnaan (jaminan) hasil suatu pekerjaan itu sendiri. Menurut dia, sebuah organisasi dinyatakan efektif apabila tujuan anggota organisasi dan tujuan organisasi tercapai sesuai atau di atas target yang telah ditetapkan. Artinya baik pihak pelanggan internal maupun pihak pelanggan eksternal organisasi merasa puas.

Dalam versi lain, Hidayat dalam Utomo[42] menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah dicapai, dimana makin besar presentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektifitasnya.

---

[40]Subagyo, *Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Pemberdayaan Masarakat Pedesaan*, (Yogyakarta: UGM, 2000), 23.
[41]Suti, *Aspek Sikap Mental dalam Manajemen SDM*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 94.
[42]Tri Utomo, *Beberapa Permasalahan dan Upaya Akselerasi Program Pemberdayaan Masyarakat*, 2009, www.geoticies.com/triwidodowu/pemberdayaan_masy.html. Tanggal 30 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitiannya Subagyo[43] mengenai efektifitas penanggulangan kemiskinan dalam pemberdayaan masayarakat pedesaan program Impres Desa Tertinggal (IDT) cukup efektif dalam memberdayakan masyarakat pedesaan. Tingkat efektifitas tersebut diukur dengan menggunakan variabel: tujuan program sebesar 60%, ketepatan sasaran sebesar 92,50%, penggunaan dana program 87,5%, mengikuti pelatihan 42,5%. Dari beberapa pengukuran variabel tersebut terlihat efektifitas program IDT cukup tinggi.

b. Efektifitas Dalam Islam

Dalam Islam mengajarkan kepada pengikutnya agar setiap mengawali suatu kegiatan senantiasa diawali dengan niat "*innamal 'amalu bin niat",* sehingga apa yang akan dihasilkan dari setiap kegiatan adalah bergantung terhadap niat yang telah disampaikan kepada Sang Pemberi Hasil. Perencanaan sebagai awal dari aktifitas pengelolaan organisasi, perlu dilakukan dengan pertimbangan yang akurat dan didukung dengan data yang valid (bahkan jika diperlukan haruslah dilakukan analisa SWOT). Dalam skala yang lebih luas bagi perusahaan sebelum adanya perencanaan, sepatutnya diawali dengan visi dan misi yang jelas, menentukan arah yang dituju suatu organisasi/perusahaan, kemudian ditetapkan strategi untuk mencapai tujuan.[44] Hal ini merupakan bagian dalam kendali langkah-langkah efektifitas dengan berlandas pada visi dan misi perusahaan/organisasi di awal.

Pandangan Dr. Wayan Sidarta, pekerjaan yang efektif ialah pekerjaan yang memberikan hasil seperti rencana semula, sedangkan pekerjaan yang efesien

[43]Subagyo, 157.
[44]Zainal, Viethzal Rivai dkk. *Islamic Managemen: Meraih Sukses Melalui Praktik Manajemen Gaya Rasulullah Secara Istiqomah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2013). 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah pekerjaan yang mengeluarkan biaya sesuai dengan rencana semula atau lebih rendah, yang dimaksud dengan biaya adalah uang, waktu, tenaga, orang, material, media dan sarana.[45] Kedua variabel efektif dan efesien tersebut selalu dipakai secara bersama dalam manajemen karena apabila hanya salah satu yang digunakan maka sebagai contoh kondisi apabila sebuah manjemen yang efektif saja sangat mungkin terjadinya pemborosan, sedangkan sebaliknya apabila manajemen yang efesien saja bisa berakibat tidak tercapainya tujuan atau rencana yang telah ditargetkan.

Dalam al-Qur'an telah dituliskan ayat yang memabahas tentang kedua hal tersebut yakni surat al-Kahfi ayat 103-104 (tentang efektif);

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَـٰلًا ﴿١٠٣﴾ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

> Artinya: (103)"*Katakanlah, Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-oarang yang paling merugi perbuatanya. (104) Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatanya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya".*[46]

Tafsir ayat tersebut yang menjadi indikator orang-orang yang merugi perbuatanya selama di dunia, yakni orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka dalam beramal dalam rangka tujuan mereka untuk mencapai keuntungan dan keutamaan. Sehingga akibat beramal dengan cara yang demikian itulah menjadikan mereka terjatuh dalam kerusakan dan kehancuran, yang pada akhirnya

[45]Wayan Sidarta, *Manjemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1999), 4.
[46]At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi per Kata dan Terjemahan per Kata*, (Kota Bekasi; Cipta Bagus Segara, 2012), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka tidak akan mencapai tujuannya (Al Imam at-Thabari dalam tafsirnya). Artinya segala upaya mereka selama di dunia ini akan batal dan sia-sia nantinya di akhirat. Sehingga seperti yang ditegaskan di awal bahwa segala perbuatan bergantung pada niatnya, maka niat menjadi titik tolak ukuran tujuan dari masing-masing individu melakukan sesuatu. Kemudian diikuti ikhtiyar dalam mencapai tujuan tersebut apakah memilih jalan yang memang diridai oleh Allah SWT atau yang disenangi oleh syaitan, maka hal ini akan menjadi proyeksi tepat tidaknya hasil yang diperoleh dalam rangka mencapai tujuan di awal. Dalam suatu organisasi, maka Visi, Misi dan Tujuan menjadi landasan gerak organisasi, melalui program kerja sebagai tafsir langkah terhadap cita-cita yang ingin dicapai oleh organisasi, dan hasil yang didapat akan berbanding lurus dengan usaha dan kekuatan visi misi organisasi tersebut. Sehingga efektivitas suatuorganisasi bukan serta merta melekat tanpa pamrih, melainkan perlu ada usaha keras dalam memadupadankan maupun merealisasikan apa yang menjadi visi misi organisasi secara tepat.

Berikutnya terdapat dalam Surat al-Isra' ayat 26-27 (tentang efesien):

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟
إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: (26) "*Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (27) Sesungguhnya permboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhanya".*[47]

[47]At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi per Kata dan Terjemahan per Kata*, (Kota Bekasi; Cipta Bagus Segara, 2012), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah organisasi yang tidak memiliki cita-cita atau gambaran masa depan yang jelas dan terjebak oleh kegiatan operasional sehari-hari akan sangat sulit melakukan kemajuan yang berarti dalam memenuhi kebutuhan dan harapan para pihak yang sangat berkepentingan *(stakeholder)* atas keberadaaan organisasi tersebut sebagai pemilik, customer dan karyawan organisasi tersebut.[48]

Organisasi yang tidak memiliki arah yang jelas, juga akan banyak melakukan gerakan-gerakan "zig-zag" serta tindakan-tindakan yang tidak jelas atau tidak perlu, yang berujung kepada inefisiensi dan pemborosan sumber daya organisasi tersebut. Banyak aset yang dibeli dengan harga mahal dengan pemanfaatan yang rendah atau bahkan tidak terpakai sama sekali.[49]

Sementara dalam prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yang digagas oleh Munrokhim dkk, efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu. Sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan maslahah paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi (*alocation efficiency*). Efisiensi teknis diukur dengan perbandingan antara hasil (*output*) dengan masukan (*input)* yang digunakan. Meskipun demikian, tercapainya efisiensi teknis tidaklah menjamin tercapainya efisiensi alokatif dengan sendirinya karena hasil kegiatan belum tentu memberikan mashlahah tertinggi bagi

[48]Zainal, Viethzal Rivai dkk. *Islamic Managemen,* 237.
[49]*Ibid*, 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Oleh karena itu, perlu dihindari tindakan berlebih-lebihan *(Israf)*baik dalam hal penggunaan sumber daya dalam konsumsi ataupun dalam produksi.[50]

c. Efektifitas Pemberdayaan Desa

Pedesaan yang senantiasa identik dengan persepsi kemiskinan, ketertindasan, terisolir, dan bebagai hal yang mendekatkan pada aspek ketertinggalan menjadi suatu magnet tersendiri untuk menjadi sasaran dalam pengembangan ekonomi. Kemiskinan dan ketertindasan selalu ada dan menjadi bagian dari problem yang menjadi isu abadi. Islam sering menyebutkan istilah kemiskinan dan ketertindasan dengan dua payung kunci, yakni *dhuafa*atau *mustadh'afin.* Dalam konteks kontemporer, pemahaman tentang kemiskinan dan ketertindasan lebih banyak berkaitan dengan problem otoritas struktural. Oleh karena itu penyebutan kemiskinan dan ketertindasan lebih tepat menggunakan ungkapan *"mustadh'afin kontemporer".*Karekateristik mustadh'afin antara lain:[51]

1. Mereka adalah individu dan atau kelompok sosial yang berada dalam posisi "minoritas" *(qolil)* baik secara kuantitatif dan atau kualitatif.
2. Mereka merupakan individu dan atau kelompok sosial yang menderita kerentanan terhadap penindasan terstruktur baik oleh kebijakan politik, ekonomi dan sosial *(istidh'af).*
3. Mereka adalah individu dan atau kelompok sosial yang belum terbebas dari rasa takut *(khawf)* dan karenanya juga tidak memiliki keberanian untuk memerlukan perlawanan terhadap penindasan.

---

[50]Munrokhim dkk, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 66-67.
[51]Zakiyuddin, Baidhawy, *Teologi Neo Al-Maun: Manifesto Islam Menghadapi Globalisasi Kemiskinan Abad 21*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2009), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga karakteristik yang dijelaskan oleh Baidhawy menjadi satu pembacaan tersendiri bahwa hal tersebut seringkali terjadi di pedesaan yang mayoritas masyaraktanya berpendidikan rendah, sehingga perlu ada suatu langkah yang mempu membangkitkan dan melepaskan kondisi yang lemah tersebut unuk mencapai struktur yang lebih baik. Dalam hal ini ekonomi Islam menjadi satu tawaran dalam mengeluarkan kondisi ketertindasan tersebut.

Pengembangan ekonomi Islam di Pedesaan tentu bukan sesuatu yang baru bagi mayoritas desa yang penduduknya beragama Islam. Nilai-nilai Islam yang telah mendarah daging dalam kegidupan sehari-hari mayarakat desa telah menjadi dasar dari praktik-praktik ekonomi. Namun demikian seingkali masyarakat pedesaan kurang menyadari bahwa mereka telah mempraktikkan sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menggali potensi dan membuat kebijakan terhadap pengembangan desa, sehingga mayarakat memiliki kesadaran untuk menggali potensi dan bergerak membangaun desa.

Salah satu strategi yang mampu menggali potensi tersebut adalah mengembangkan desa yang berbasis ekonomi syariah. Menurut Chandler, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitanya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.[52] Beckhart menyatakan bahwa pengembangan Organisasi adalah upaya yang berencana, meliputi keseluruhan organisasi, dan dikelola dari atas untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi terencana

[52]Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Trategik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap proses yang terjadi dalam organisasi dengan memanfaatkan pengetahuan yang berasal dari ilmu perilaku.[53]

Sistem ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di pedesaan, diantara sistem ekonomi kapitalis (perkotaan) yang dominan dan pra kapitalis bagian dari masa lalu desa. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang merujuk pada syari'at sebagai nilai dan norma kehidupan yang datang dari Allah SWT, yang diyakini para penganutnya sebagai suatu sistem yang memiliki kekuatan dan kemampuan memakmurkan dan mensejahterakan para pengamalnya baik muslim maupun non muslim. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sistem ekonomi Islam bersifat Universal bagi semua umat manusia, tidak pandang Islam maupun non Islam.[54] Sebagai pengetahuan ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari berbagai upaya manusia yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar nilai Islam (Al Qur'an dan As Sunah) dengan mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* (kemuliaan, kesejahteraan).[55]

Dalam pandangan Didin S. Damanhuri menyebutkan bahwa *falah* menunjuk pada kondisi kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan umum, baik secara material maupun spiritual, dan terciptaya kemakmuran serta keadilan sosial. Untuk mewujudkan kondisi tersebut maka harus ada keadilan ekonomi baik makro maupun mikro sebagai basis sederhana (*felt needs).* Terlembagakanya keuangan syariah yang progreseif, sebagai bentuk dekonstruksi sistem *bubble economy, erzatz/crony capita-lism.* Pengembangan sistem *extended family* sebagai basis pengembangan model negara kesejahteraan yang mementingkan peran nilai

[53]Komaruddin, *Management Berdasarkan Sasaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 222.
[54]Pradja, Juhaya S., *Ekonomi Syariah*, (Bandung:pustaka setia, 2012), 74.
[55]Munrokhim, dkk., *Ekonomi Islam*, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan materi secara seimbang. Kemudian mewujudkan negara dengan berlandaskan pada *tauhid,adalah, dan kholifatul fil ardh.* Prinsip-prinsip tersebut berlaku pula dalam upaya mewujudkan kehidupan yang baik (*hayatan thoyyiban).*[56]

Konsep ekonomi Islam berbeda secara mendasar dengan kapitalise dan sosialisme. Ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Komiten Islam yang besar pada persauadaraan dana keadilan, menuntut agar sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan maqosid syari'ah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumber daya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil. Instrumenya berupa; zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-import dan sebagainya.[57]

Disaat ekonomi konvensional hanya terfokus pada persoalan hukum dan sebab akibat (kausalitas) dari suatu kegiatan ekonomi, maka ekonomi Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkadung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Semua itu didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist yang memiliki prinsip-prinsip universal. Mendasarkan nilai-nilai tersebut kegiatan ekonomi Islam menekankan fondasi pada nilai ketauhidan (aqidah), syariah, dan akhlak.

---

[56]Didin S. Damanhuri, Global Sistem Ekonomi dan Model Pembangunan yang ber keadilan sosial (Revitalisasi Maqosid Syariah di tengah-tengah Hegemoni Ekonomi Konvensional), di dunia dan di Indonesia, *Makalah*, IE FEM IPB, September 2013.

[57]Thohir Yuli Kusmanto, Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Pedesaan, *Jurnal Ilmu Dakwah,* Vol.34, No.2, (Juli-Desember 2014), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Konsep Desa Mandiri

Desa Mandiri adalah kondisi yang mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk/karya desa yang membanggakan dan kemampuan desa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanya. Dalam istilah lain, Desa Mandiri bertumpu pada Trisakti Desa yaitu; Karsa, Karya, Sembada. Jika trisakti desa dapat tercapai maka desa itu disebut sebagai desa berdikari. Karsa, Karya, Sembada desa mencangkup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi desa dan antar desa, makin kuatnya sistem partisipatif desa, serta terbangunnya masyarakat di desa yang kuat secara ekonomi dan sosial-budaya serta memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan desa.[58]

Tiga daya tersebut selaras dengan Konsep yang disampaikan Ahmad Erani Yustika selaku Dirjen PPMD Kemendes PDTT pada beberapa kesempatan, bahwa membangun desa dalam konteks Undang-undang No.6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Konsep tersebut dikenal dengan istilah "Jaring Komunitas Wira Desa, Lumbung Ekonomi Desa, Lingkar Budaya Desa".

[58]Lendy W Wibowo, lihat https://kerjamembangundesa.wordpress.com/2015/11/23/konsep-desa-mandiri/ diakses pada 2 Juli 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.3
Keberdayaan Desa pada Bidang Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan

Jaring Wira Desa adalah upaya menumbuhkan kapasitas manusia desa yang mencerminkan sosok manusia desa yang cerdas, berkarakter dan mandiri. Jaring wira desa menempatkan manusia sebagai aktor utama sekaligus mampu menggerakkan dinamika sosial ekonomi serta kebudayaan di desa dengan kesadaran, pengetahuan serta ketrampilan sehingga desa juga melestarikan keteladanan sebagai soko guru kearifan lokal.[59]

Lumbung Ekonomi Desa tidak cukup hanya menyediakan basis dukungan finansial terhadap rakyat miskin, tetapi juga mendorong usaha ekonomi desa dalam arti luas. Penciptaan kegiatan-kegiatan yang membuka akses produksi, distribusi, dan pasar *(access to finance, access to production, access to*

[59]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

distribution and access to market) bagi rakyat desa dalam pengelolaan kolektif dan individu mesti berkembang dan berlanjut. Pembangunan dan pemberdayaan desa diharapkan mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah konsep mengenai perkuatan dan kontribusi yang disumbangkan oleh sektor ekonomi riil. Sektor ekonomi riil yang tumbuh dan berkembang dari bawah karena dukungan ekonomi rakyat di desa.

Pertumbuhan ekonomi dari bawah bertumpu pada dua hal pokok yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku ekonomi lokal untuk memanfaatkan sumberdaya milik lokal dalam rangka kesejahteraan bersama dan memperbanyak pelaku ekonomi untuk mengurangi faktor produksi yang tidak terpakai.

Karena pasar tidak bisa membentuk bahkan menstimulasi kesempatan dan pelaku dalam keadaan ketidakseimbangan modal, informasi, dan akses lain yang dimiliki para pelaku, maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam bentuk fasilitasi dan regulasi. Kurang adanya intervensi yang pantas dari pemerintah dalam daya ekonomi bawah ini telah menyebabkan permasalahan antara lain kegagalan pasar, terjadinya monopoli, misalokasi sumberdaya, dan adanya sumberdaya yang tidak terpakai.

Lingkar Budaya Desa mengangkat kembali nilai-nilai kolektif desa dan budaya bangsa mengenai musyawarah mufakat dan gotong royong serta nilai-nilai manusia (desa) Indonesia yang tekun, bekerja keras, sederhana, serta punya daya tahan. Selain itu lingkar budaya Desa bertumpu pada bentuk dan pola

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunalisme, kearifan lokal, keswadayaan sosial, teknologi tepat guna, kelestarian lingkungan, serta ketahanan dan kedaulatan lokal, hal ini mencerminkan kolektivitas masyarakat di Desa. [60](Lendy W Wibowo, Pejaten 23 November 2015).

Konsep pembangunan desa di Indonesia terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Naisonal periode 2005-2025[61] Dokumen tersebut dimulai dari pemaparan kondisi umum dan tantangan, sehinggan menghasilkan visi dan misi pembangunan. Serangkaian sasaran pembangunan disusun untuk mencapai visi pembangunan. Untuk meraih sasaran yang telah ditetapkan, disusunlah arah pembangunan jangka panjang kemudian secara khusus disusun prioritas pengembangan lima tahunan.

Berdasarkan misi untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, telah ditetapkan sasaran khusus di pedesaan, berupa pemenuhan elektrifikasi pedesaan. Selanjutnya, dirumuskan arah pembangunan untuk pedesaan jangka panjang. *Pertama*, arah pembangunan untuk memperkuat perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global. Secara rinci arah kebijakan di sini meliputi:

a. Peningkatan efesiensi, modernisasi, nilai tambah pertanian, kelautan, dan pertambangan.
b. Pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan.
c. Perdagangan luar negeri yang mampu mengembangkan pedesaan.
d. Pengembangan sektor keuangan termasuk di pedesaan.

---

[60](Lendy W Wibowo, Pejaten 23 November 2015), lihat https://kerjamembangundesa.wordpress.com/2015/11/23/konsep-desa-mandiri/ diakses pada 2 Juli 2018

[61]Undang-undangn No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Naisonal Tahun 2005-2025.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, arah pembangunan sarana dan prasaranan yang memadai dan maju. Hendak dibangun sistem transportasi perintis berbasis masyarakat.

Berkaitan dengan misi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, telah ditetapkan sasaran lingkungan pedesaan yang berkelanjutan. Terdapat tiga arah pembangunan jangka panjang. *Pertama,* pembangunan sistem perkotaan nasional. *Kedua,* keterkaitan ekonomi pedesaan dan perkotaan. *Ketiga,* pembangunan pedesaan melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan jaringan infrastruktur, peningkatan akses informasi, pengembangan social capital, intervensi kebijakan perdagangan pertanian.[62]

Konsep pembangunan yang tercantum dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tantang Desa dapat mempengaruhi cara arah kebijakan dan program pembangunan jangka panjang,[63] jangka menengah[64] dan tahunan.[65] Berbagai program tersebut diarahkan untuk memenuhi mandat dari Undang-undang tentang desa.

Sesuai dengan UU 6/2014 tantang Desa, pembangunan desa dan kawasan pedesaan memiliki tujuan akhir *(impact)* meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kemiskinan.[66] Tujuan akhir

---

[62]Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 157.
[63]Tercantum dalam Undang-undangn No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Naisonal Tahun 2005-2015.
[64]Tercantum dalam Peraturan Presiden No.2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Naisonal Tahun 2015-2019.
[65]Tercantum dalam rencana kerja Pemerintah.
[66]Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pebangunan desa dan kawasan pedesaan juga mencangkup tercapainya kemandirian,[67] pendapatan desa,[68] dan daya saing desa.[69]

Untuk mencapai manfaat pembangunan tersebut, diharapkan program dan kegiatan menghasilkan *(output)* batas desa dan kawasan yang jelas,[70] hasil sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan primer atau dasar, hasil-hasil usaha ekonomi, perguliran dana, bantuan sosial dan hibah untuk orang miskin,[71]pelayanan pemerintahan desa,[72] berbagai kegiatan kemasyarakatan yang meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat.[73]

[67]Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diktum "Menimbang".
[68]Pasal 26, 72,77 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
[69]Pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
[70]Pasal 17 101 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
[71]Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
[72]Pasal 4,7,67,74 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
[73]Pasal 67,74Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar. 2.4

Kausalitas Teoritis Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

IMPACT

- Peningkatan kualitas hidup
- Kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
- Pengurangan kemiskinan
- Kemandirian, pendapatan desa dan daya saing desa

OUTCOME

- Pemanfaatan Sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- Pengembangan teknologi tepat guna
- Pengembangan potensi ekonomi lokal dan akses kegaiatan ekonomi
- Pengembangan usaha bersama untuk meningkatkan daya saing
- Peningkatan efektifitas pemerinth desa untuk mempercepat dan meningkatkan akses maupun kualitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat
- Mempercepat pembangunan desa
- Pemberdayaan masyarakat
- Pembinaan kelembagaan masyarakat
- Kestabilan keamanan dan ketertiban

OUTPUT

- Batas desa dan kawajasan jelas
- Hasil sarana dan prasarana
- Pemenuhan kebutuhan primer atau dasar
- Hasil-hasil usaha ekonomi
- Perguliran dana, bantuan sosial, dan hibah untuk orang miskin
- Layanan pemerintah desa
- Kegiatan masyarakat yang meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat

PROCESS

- *Norma pembangunan partisipatif*, kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, pengarusutamaan perdamaian, keadilan sosial, memanfaatkan kearifan lokal, memanfaatkan sumber daya alam desa, transparansi informasi perencanaan dan pelaksanaan, serta pemantauan oleh masyarakat desa.
- *Strategi kolaboratif*. Pembahasan bersama pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa.
- *Proses menuju kemandirian*. Menggunakan sumber daya alam desa, menggunakan sumber daya manusia desa, pengelolaan aset desa, dilaksankan oleh pemerintah desa, atau dilaksanakan oleh BUMDesa,
- *Proses pelembagaan.* Pembentukan badan kerjasama antar-desa, pembentukan kelompok/lembaga, pembentukan BUMDesa, musyawarah antar-desa, atau musyawarah desa.
- *Pendampingan;* terutama pendampingan teknis dan pendampingan akses ke pasar.

INPUT

- Prioritas program, dan kegiatan pembangunan
- Penyertaan langsung oleh Desa dalam BUM Desa
- Hibah dari pemerintah, pemda provinsi, atau pemda kan/kota
- Akses permodalan dari pemerintah pemda provinsi, atau pemda kan/kota

LINGKUNGAN

- Peraturan dan kebijakan
- Program dan kegiatan yang telah diterima desa
- Sumberdaya dan teknologi lokal
- Pendanaan dan usaha ekonomi lokal
- Aset desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Etika Islam dalam Aktivitas Ekonomi

Islam telah memberikan suatu konsep dalam aktivitas ekonomi, yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri. Terbentuknya etos ekonomi dalam Islam merupakan gabungan dari nilai aktual dari moral spiritual dengan rasionalitas perhitungan untung dan rugi dalam jual-beli, sehingga membentuk suatu keseimbangan diantara keduanya sebagai dasar dalam aktifitas ekonomi. Al-Qur'an telah mengungkapkan intrumen terhadap pelaku ekonomi (perdagangan) dalam Al- Qur'an Surat Al-Jumu'ah; 9-10:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝٩ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۝١٠

Artinya: (9)"*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diseru (kepadamu) untuk melaksankan shalat pada hari Jum'at, akan bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (10) Dan apabila sholat telah dilaksankan, maka bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah dan perbanyak mengingat-Nya agar kamu beruntung"*.(QS. Al-Jumuah: 9-10)[74]

Konsepsi sosial-keagamaan di atas menjelaskan bahwa perilaku ekonomi kaum Muslim pada hakekatnya adalah manifestasi pengalaman dalam mengaktualisasikan ajaran agama. Oleh karena itu, dalam mencapai suatu kebahagiaan hidup tidak hanya memperhatikan suatu perhitungan untung dan

[74]At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi per kata dan terjemahan per kata*, (Kota Bekasi; Cipta Bagus Segara, 2012), 553

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rugi. Lebih dari itu, manusia harus mampu menghitung hal-hal yang bersifat non-materil.

Sebagaimana telah diketahui. Melebarnya "jurang pemisah" di antara orang kaya dengan orang miskin dapat memunculkan berbagai problem pada tataran sosial, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Memaknakan kehidupan dengan konsep kesejahteraan berarti merujuk pada pengertian holistik dan seimbang berdimensi priritual-material, sosial-individu, dan dunia-akhirat.

Dalam konsep Islam, etos ekonomi kaum Muslim tidak hanya terbentuk dari tradisi budaya, tetapi juga bersumber dari keyakinan agama yang membentuk etos spiritual individu seperti iman, ikhsan, ikhlas dan takwa. Nilai-nilai yang terbentuk etos ekonomi itu diimplementasikan dalam bentuk kesalehan Ilahiyah, Individu, dan sosial, yang menjadi media terciptanya kesejahteraan hidup spiritual dan material. Hal ini berbeda dengan etos ekonomi konvensional yang menekankan pencapaian kesejahteraan hidup terletak pada kelebihan secara materil.

Ibnu Khaldun dalam Dawam Rahardjo,[75] mengonsepsikan etos kerja sebagai munculnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan manusia yang bersumber dari rangkaian hasil kerjanya. Pemanfaatan atas nilai kerja tersebut merupakan kata kunci untuk mencari rezeki. Melalui rahmat-Nya, tuhan memberikan rezeki kepada setiap orang. Namun prasyarat utamanya adalah jika dia bekerja untuk mendapatkan ezeki yang telah ditetapkan Allah SWT. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat at-Taubah: 105;

---

[75]Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Kunci*, (Jakarta:Paramadina, 2002), 587.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Artinya: "*Dan katakanlah; bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan*.[76]

Terbentuknya etos kerja kaum Muslim mengait modal dengan keyakinan agama yang diimpletasikan dalam bentuk amal ibadah *(ubudiyah)*kepada Tuhan dan amal sosial *(muamalah)* kepada sesama manusia. Menurut Kuntowijoyo, konsep Islam tentang rahmat bagi semesta alam *(Rahmatan Lil 'Alamiin)* menegaskan bahwa keimanan kepada Tuhan menjadi pusat dari semua orientasi nilai. Pada saat yang sama, nilai-nilai itu menempatkan manusia sebagai tujuan transformasi.[77] Karena Islam tidak hanya bersentuhan pada persoalan teologi, aturan hukum, dan peribadatan, melainkan persoalan lain tentang tata kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Paradigma Islam tidak mendikotomikan domain kehidupan dunia bersifat sekuler dengan akhirat yang menjadi fokus utama pengajaran agama. Justru kedua domain tersebut haruslah terintegrasikan dengan baik sebagai basis terbangunnya peradaban manusia. Secara filosofis, Islam menepatkan manusia dalam bingkai *"humanitas teosentris*" yakni manusia dengan keimanan kepada Tuhan mengarahkan tindakan dalam konteks transformasi nilai-nilai kehidupan sosial

[76]At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi per kata dan terjemahan per kata*, (Kota Bekasi; Cipta Bagus Segara, 2012), 203
[77]Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 2008), 272-280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemasyarakatan. Yang pada dasarnya, etos ekonomi dalam Islam merujuk pada orientasi "keseimbangan hidup" dunia dan akhirat. Arus utama dalam Islam mencirikan tingkah laku rasional manusia dengan tujuan memanfaatkan berbagai sumber daya ekonomi berorientasi keseimbangan material dan spiritual, bukan bertumpu pada kepeningan individu seperti yang menonjol dalam kapitalisme. Dalam masyarakat kapitalis, esensi manusia yang terintegrasi dengan pasar membuat kualitas kerja dan kemanusiaan senatiasa ditentukan oleh mekanisme pasar. Sementara dalam masyarakat sosialis, orientasi kemanusiaan diposisikan sebagai bagian dari elemen kekuasaan negara atau birokrasi pemerintah yang menafikan hakikat "pilihan bebas" dan "kreativitas".[78]

6. Konsep Pembangunan Desa (Pendekatan Ekonomi Pembangunan Syariah)

Dalam pengembangan desa dibutuhakan suatu pendekatan yang mampu mengakomidir kebutuhan umat muslim secara komprehensif dan holistik. Pendekatan ini adalah pendekatan ekonomi pembangunan syariah. Sebagaimana dengan hasil riset K.A Ishaq pada tahun 2003 yang dikutip oleh Dr. Irfan Syauqi Beik dalam bukunya menyatakan bahwa di antara penyebab kegagalan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang adalah karena diabaikanya instrumen pembangunan yang sesuai dengan agama dan kebudayaan lokal. Karena itu, pendekatan konsep ekonomi pembangunan syariah memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat dibutuhkan, khususnya bagi Indonesia maupun

[78]M. Luthfi Malik, *Etos Kerja, Pasar dan Masjid: Transformasi Sosial-Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan,* (Jakarta: LP3ES, 2013), 54-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara-negara anggota OKI.[79]Ekonomi Pembangunan Syariah adalah konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah Salallahu alaihi wassalam. [80]

Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakikatnya juga merupakan usaha mempunyai makna etik, hukum, serta nilai ajaran agama baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai pembangunan nasional. Oleh karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama. Akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan itu, jika nilai-nilai etik dan ajaran agama tidak melekat dalam proses pembangunan, maka pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat *dehumanistik*, atau merusak kemanusiaan.[81]

Penyelenggraaan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehigga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini terdapat atau dipertegas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni pada pasal 1 ayat satu "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyrakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

[79]Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 12.
[80]Ibid, 13.
[81]Machnun Husain, *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia,* (Jakarta:Rajawali Pers, 1989),1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".[82]

Apa yang telah diterbitkan dalam undang-undang tersebut telah memberikan penjelasan dengan sangat bagus dan jelas, namun dalam implementasi memerlukan pengaturan lebih rinci sehingga desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa melaksanakan kewenangan hak dan kewajibanya dengan baik selaku pimpinan pemerintah desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun/unsur wilayah, unsur pelaksana teknis dan bermitra secara sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku legislaif di tingkat desa. Dalam fiqh siyasah terdapat perinsip kekuasaan terhadap pemimpin yang memegang tagus amanah masyarakat, yakni terdapat dalam Qu'an surat an-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ
إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkanya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*"[83]

Apabila ayat di atas dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazarin dan

[82]Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
[83]At-Thayyib, *Al-Qur'an Transliterasi per kata dan terjemahan per kata*, (Kota Bekasi; Cipta Bagus Segara, 2012), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembangkan oleh Sajuti Thalib,[84] maka dari ayat tersebut dapat ditarik dua garis hukum, yaitu: *pertama*, manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum *kedua* yaitu manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Kata *Amanat* dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan "titipan" atau "pesan".[85] Dapat dipahami kata amanat itu adalah suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat di sebut "mandat" yang bersumber atau berasal dari Allah.

[84]Muchamad Mirsa Kurniawan, Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah", *Al-Daulah*, Vol.6, No. 2 (Oktober, 2016), 322.
[85]Umi Chulsum, Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesi; Edisi Terbaru*, (Surabaya: Kashiko Publisher, 2014), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MANDIRI BERBASIS EKONOMI SYARIAH DI DESA SYARIAH CUKIR KABUPATEN JOMBANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran mengenai Desa Syariah Cukir, maka di bawah ini dengan sengaja disajikan data hasil penelitian untuk memberikan gambaran komprehensif situasi sosial masyarakat Desa Syariah Cukir, terutama sekali mengkaji: lokasi dan kependudukan, keberagaman kelompok etnik dan agama, profil pendidikan, sistem ekonomi dan struktur komunitas, organisasi dan kelembagaan sosial, serta pengelolaan sumberdaya lokal.

1. Kondisi Sosial

Desa Syariah Cukir merupakan desa yang menjadi pusat perdagangan dari kecamatan Diwek, yang merupakan desa dengan tipilogi Perindustrian/Jasa sehingga memiliki potensi pengembangan usaha yang cukup baik. Desa dengan batas wilayah utara desa Kwaron, sebelah selatan desa Kayangan, sebelah timur dengan Desa Grogol/Bendet dan sebelah barat desa Keras dengan luas wilayah mencapai 339,635000 Ha yang berada pada titik koordinat 112.239891 BT/ -7.61183 LS. Yang didiami oleh 8.451 jiwa dalam 2.413 kepala keluarga.[1] Adapun luas tanah tersebut digunakan:

[1]Diolah dari Data Pokok Desa/ Kelurahan Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1
Luas tanah menurut penggunaan

No	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Sawah	91,5100
2	Tegal/Ladang	2,9100
3	Pemukiman	83,5600
4	Pekarangan	35,5000
5	Perkebunan	35,5000
6	Tanah Kas Desa	13,7700
7	Fasilitas Umum	76,8850

Dari jenis penggunaan tanah di Desa Syariah Cukir sebagian besar/ 27 % wilayahnya adalah tanah pertanian atau persawahan. Ada beberapa komoditi yang dihasilakan dari pertanian tersebut, diantaranya adalah tanaman padi dan tebu, selain dari pada itu petani juga menanam kedelai, jagung dll di kondisi tertentu.

Desa Syariah Cukir Kecamatan Diwek didiami oleh dua etnik yakni Jawa 99 % dan Cina 1 % dengan 4 aliran agama yakni Islam 99.24%, Kristen 0.67%, Katholik 0.2%, dan Budha 0.1%. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa entik di desa tersebut adalah etnik jawa yang merupakan penduduk beragama Islam.

Pada aspek pendidikan masyarakat di Desa Syariah Cukir mencapai 72% dari total penduduk dengan rincian berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

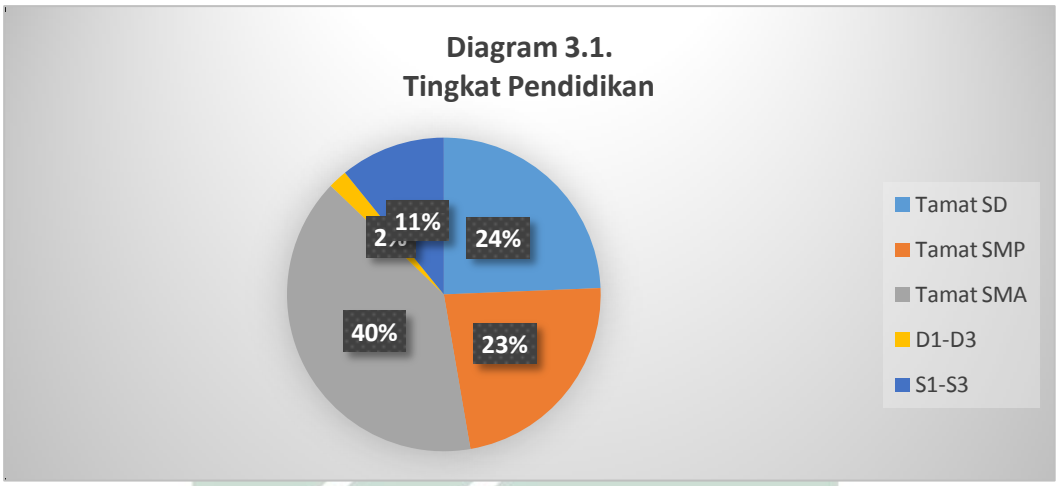

Melihat diagram di atas dapat kita katakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Syariah Cukir tergolong baik. Dengan ukuran wajib belajar 9 tahun di atas 50%.

Melihat aspek kesejahteraan sosial masayarakat Desa Syariah Cukir maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Masalah	Jumlah/orang
1	Orang gila/stres/cacat mental	5
2	Orang cacat fisik	3
3	Anak yatim usia 0-18 tahun	15
4	Anak piatu usia 0-18 tahun	7
5	Anak yatim piatu usia 0-18 tahun	8
6	Janda	438
7	Duda	73
8	Anak remaja, preman dan pengangguran	112
9	Perempauan yang menjadi kepala keluarga	440

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada aspek ini maka perlu adanya sebuah penanganan dalam konteks kesejahteraan keluarga, sehingga dapat ditemukanya persoalan-persoalan sosial yang menjadi persoalan pertumbuhan ekonomi keluarga. Persepsi tentang kesejahteraan keluarga terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang mempu memenuhi kebutuhan spritual dan kebutuhan material.

Kondisi kesejahteraan keluarga di Desa Syariah Cukir dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Kesejahteraan Keluarga[2]

No	Kategori	Jumlah (KK)
1	Keluarga Prasejahtera	125
2	Keluarga Sejahtera 1	224
3	Keluarga Sejahtera 2	763
4	Keluarga Sejahtera 3	976
5	Keluarga Sejahtera 3+	325

Pada tabel tersebut di atas dapat dilihat pada kategori Keluarga Prasejahtera[3] mencapai 5%. Kondisi ini menjadi gambaran masih adanya kepala keluarga yang tertinggal jauh pada aspek kesejahteraan keluarga.

[2]Data Pokok Desa/ Kelurahan Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016.

[3]Indikator keluarga sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok pikiran yang terkandung di dalam Undang-undang no. 10 tahun 1992 disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operational. Karena indikator yang dipilih akan digunakan oleh kader di desa, yang pada umumnya tingkat pendidikan relatif rendah, untuk mengukur derajat kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan untuk melakukan intervensi, maka indikator tersebut selain harus memiliki validitas yang tinggi, juga dirancang sedemikian rupa, sehingga cukup sederhana dan secara operasional dapat dipahami dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada aspek kelembagaan Desa Syariah Cukir memiliki 109 jenis lembaga kemasyarakatan mulai dari lembaga struktural desa sampai dengan lembaga yang bersifat kemasyarakatan seperti organisasi keagamaan dan organisi pemuda dan Perempuan. Hal ini menjadi gambaran kondusifitas desa sebagai basis gerakan kemasyarakatan dalam mencapai program-program desa.

2. Kondisi Ekonomi

Eksistensi dan esensi desa sebagai suatu kesatuan masyarakat telah lama ada bahkan sebelum era kemerdekaan. Dalam tatanan sistem kerajaan, desa dijadikan sebagai wilayah yang keberadaanya hanya untuk tujuan kontrol kuasa dari raja. Pada masa tersebut, elite/ kepala desa menjadi kepanjangan tangan raja. Mereka adalah pemancar kuasa raja yang setiap bulan diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) di keraton. Diklat ini bertujuan untuk penertiban dan pendisiplinan agar para elite desa tetap dalam koridor kuasa raja.[4]

Pada masa kolonia, alih-alih kesejahteraan masyarakat desa terangkat, justru desa semakin terperosok dalam kemiskinan dan tanam paksa yang diterapkan secara hegemonik tanpa memperhatikan unsur kesejahteraan masyarakat. Masyarakat desa diwajibkan menanam tanaman yang sesuai dengan kebutuhan rezim. Sistem bagi hasil sangat merugikan bagi para petani. Di saat yang sama mereka juga diwajibkan untuk membayar umpeti.[5]

---

dilakukan oleh masyarakat di desa. Pada kategori keluarga prasejahtera sendiri merupakan keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera 1, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.

[4]Denys A Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya III-Warisan Kerajaan Konsentris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 66.

[5]Nasrun Annahar. Dkk, *Sejahtera Dari Desa: Refleksi Pemberdayaan Berbasis Potensi Pertanian*, (Malang:Averroes Press, 2017), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada aspek Ekonomi dan struktur komunitas Ekonomi yang umumnya penduduk Desa Syariah Cukir mempunyai matapencaharian sebagai petani dengan jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga sebesar Rp 1.750.000,00, berbeda dengan mereka yang mengelola perkebunan dengan pendapatan perkapita lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja sebagai petani/buruh tani, adapun pendapatan perkapita untuk perkebunan yakni Rp 2.150.000,00.

Tabel 3.4

Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2011-2015[6]

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	116
2	Buruh tani	33
3	Pegawai Negeri	99
4	Pedagang klontong	345
5	Pedangang Keliling	147
6	Pemilik Usaha warung makan dan restoran	129
7	Angkutan	34
8	TNI/POLRI	14
9	Guru Swasta	168
10	Karyawan perusahaan swasta	1.218
11	Buruh harian lepas	25
12	Buruh usaha jasa transportasi	47
13	Sopir	17
14	Karyawan Honorer	3
15	Pensiunan	68
16	Lain-lain	5848

[6] Data potensi sosial ekonomi desa/kelurahan RPIM Desa Cukir tahun 2011-2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain Desa Syariah Cukir memiliki beberapa lembaga ekonomi dalam bentuk Unit usaha desa, jasa lembaga keuangan, industri kecil dan menengah dan beberapa usaha sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5

Lembaga Ekonomi Desa[7]

No	Lembaga	Jenis Usaha	Jumlah /Unit	Jumlah Pengurus/ Tenaga Kerja
1	Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Desa/Kelurahan	Kelompok simpan pinjam	1	2
2	Jasa Lembaga Keuangan	a. Bank Pengkreditan Rakyat	7	32
		b. Pegadaian	1	2
		c. Bank Pemerintah	4	15
3	Industri kecil dan menengah	a. Industri Makanan	7	14
		b. Industri Alat rumah tangga	1	2
		c. Industri kerajinan	3	6
		d. Rumah makan dan Restoran	17	17
4	Usaha jasa pengangkutan	Akutan desa dan perkotaan	5	15
5	Usaha jasa dan perdagangan	a. Pasar hasil bumi/Tradisional/harian	1	700
		b. Usaha toko/kios	300	330
		c. Usaha peternakan	5	20
		d. Penitipan kendaraan bermotor	10	25
6	Usaha jasa hiburan	Group musik/Band	3	30
7	Usaha jasa Gas,Listrik,BBM dan Air	Pengecer Gas dan BBM	15	15
8	Usaha jasa	a. Tukang kayu	13	33

[7] Data Pokok Desa/ Kelurahan Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	keterampilan	b. Tukang batu	15	45
		c. Tukang jahit/bordir	12	36
		d. Tukang Cukur	9	12
		e. Tukang Servis Elektronik	12	15
		f. Tukang Gali Sumur	3	9
		g. Tukang Oijat/urut/pengobatan	5	5
9	Jasa Hukum dan konsultasi	Notaris	1	3
10	Jasa Penginapan	Persewaan kamar	10	20

Membaca tabel di atas mampu memberikan gambaran potensi ekonomi Desa Syariah Cukir yang cukup tinggi. Hal ini menjadi salah satu modal dalam pengembangan usaha mandiri suatu desa. Dengan letak yang cukup strategis, dengan kondisi tanah yang datar dan subur dapat menunjang produktifitas pertanian. Kemudahan transportasi yang dapat diakses menggunakan angkutan umum menjadikan mobilitas warga Desa Syariah Cukir cukup tinggi, sehingga memudahkan masyarakat menjangkau sumber-sumber kegiatan ekonomi.

Selain daripada potensi ekonomi yang telah dikelola oleh masyarakat, Desa Syariah Cukir sendiri memiliki sumber keuangan dalam pelaksanaan kegiatan. Merujuk pada laporan realisasi pelaksanaan APBD tahun 2017 selain dari dana desa, Cukir memiliki pendapatan hasil usaha desa[8] dan bagi hasil pajak dan retribusi. Ini menjadi bentuk kemandirian desa dalam mengembangkan suatu usaha desa. Dana-dana tersebut selain dari pada digunakan untuk pembangunan

[8]Usaha desa tersebut dalam bentuk koperasi pinjaman modal usaha, adapun platfon yang diberikan mencapai Rp 5.000.000,00/ setiap usaha. Dengan margin 1 % per tahun. Dengan rata-rata lama pinjaman 1 tahun. (wawancara dengan kaur keuangan Ibu Nilam Eka Nurcahya pada tanggal 5 Juni 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa, pada bidang pemberdayaan masyarakat memiliki kegiatan-kegiatan seperti bantuan kepada rumah tangga miskin dan bantuan sosial lainya.[9]

3. Kondisi Keagamaan

Faktor utama yang mendorong dan memicu penelitian ini secara cermat yaitu kondisi objektif masyarakat Desa Syariah Cukir yang mayoritas beragama Islam dan merupakan wilayah dengan pesantren yang cukup besar di Jawa Timur. Di sisi lain desa tersebut masih memiliki beberapa karakteristik terkait dengan desa yang jauh dari kesejahteraan dengan ukuran tingginya angka tingkat pendidikan masyarakat tamat SD/Sederajat menjapai 24% dan angka pengangguran usia 18-56 tahun yang masih mencapai 2%.[10]

Agama Islam sebagai suatu agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat desa tersebut, telah sejak lama menganjurkan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Terutama dalam rangka mengatasisi krisisi atau kemelut ekonomi, masalah kemiskinan yang berkepanjangan, meningkatkan kesejahteraan umat, pemanfaatan potensi wisata, serta pemenuhan kebutuhan hidup manusia keseharian.

Pada aspek pengembangan pemahaman masyarakat tentang keagaman berikut kami sajikan data pendidikan formal keagamaan:

Tabel 3.6

Pendidikan Formal Keagamaan[11]

[9]Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Pemerintah Desa Cukir Tahun Anggaran 2017

[10]Data Pokok Desa/ Kelurahan Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016

[11] Data Pokok Desa/ Kelurahan Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO	NAMA	JUMLAH	TENAGA PENGAJAR	JUMLAH SISWA/MAHASISWA
1	Sekolah Islam	4	75	1200
2	Raudhatul Athfal	4	25	544
3	Ibtidayah	4	75	1200
4	Tsanawiyah	4	75	675
5	Aliyah	5	90	1200
6	Pompes	8	80	4500

Ada potensi besar dalam melakukan pendampingan masyarakat untuk memahami bagaimana potonsi pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah.

Selain daripada melalui lembaga pendidikan formal keagamaan, masyarakat Desa Syariah Cukir sendiri memiliki kegiatan yang rutin dan kental dengan gerakan kemasjidan, hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak sekdes bahwa masyarakat senantiasa melakukan kajian mulai dari kajian harian maupun mingguan yang dilakukan di masjid/langgar/surau/mushola.[12] Adapun potensi tersebut dapat dilihat dengan jumlah masjid 5 buah dan langgar/surau/mushola 34 buah.

Desa Syariah Cukir yang identik dengan adanya salah satu pesantren yang cukup tua yakni Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang merupakan awal peradaban keagamaan (Islam) di Jawa atau lebih tepatnya di Jombang yang pada penghujung abad ke-19, di sekitar Tebuireng bermunculan pabrik-pabrik milik orang asing (terutama pabrik gula). Bila dilihat dari aspek ekonomi, keberadaan pabrik-pabrik tersebut memang menguntungkan

[12]Wawancara dengan bapak M. Sujito (Sekretaris Desa Syariah Cukir) pada 5 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena akan membuka banyak lapangan kerja. Akan tetapi secara psikologis justru merugikan, karena masyarakat belum siap menghadapi industrialisasi. Mereka belum terbiasa menerima upah sebagai buruh pabrik. Upah yang mereka terima biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif-hedonis. Budaya judi dan minum minuman keras pun menjadi tradisi.

Ketergantungan rakyat terhadap pabrik kemudian berlanjut pada penjualan tanah-tanah rakyat yang memungkinkan hilangnya hak milik atas tanah. Diperparah lagi oleh gaya hidup masyarakat yang amat jauh dari nilai-nilai agama. Kondisi ini menyebabkan keprihatinan mendalam pada diri Kiai Hasyim. Beliau kemudian membeli sebidang tanah milik seorang dalang terkenal di dusun Tebuireng. Lalu pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 H (bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 1899 M.). Kiai Hasyim mendirikan sebuah bangunan kecil yang terbuat dari anyaman bambu (Jawa: *tratak*), berukuran 6 X 8 meter.[13] Bangunan sederhana itu disekat menjadi dua bagian. Bagian belakang dijadikan tempat tinggal Kiai Hasyim bersama istrinya, Nyai Khodijah, dan bagian depan dijadikan tempat salat (mushalla). Saat itu santrinya berjumlah 8 orang,[14] dan tiga bulan kemudian meningkat menjadi 28 orang.

Pesantren, sebagai sistem pendidikan pribumi yang memiliki latar budaya dan sosial, semenjak kemunculanya mudah diterima dan kemudian mengakar kuat di dalam masyarakat Indonesia.[15] Karena pesantren merepresentasikan pendidikan unik yang mensintesakan dimensi sosial, budaya dan agama, maka sintesis ini

---

[13]Tanggal pendirian *tratak* ini dicatat sebagai awal berdirinya Pesantren Tebuireng.
[14]Konon, kedelapan orang santri itu dibawa oleh Kiai Hasyim dari pesantren Keras (asuhan Kiai Asy'ari).
[15]Ismail SM, et al. (ed,) *Dinamika Pesantren dan Madrasah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), XIV.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian mempengaruhi fungsi pesantren baik secara internal maupun eksternal. Pesantren kemudian muncul sebagai sebuah komunitas yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas kreatif dalam pembangunan masyarakat dengan menggunakan pendidikan alternatif yang menggabungkan pendidikan dan pengajaran.[16]

Dalam merespon modernitas, aktivitas yang dilakukan pesantren selama ini adalah dengan mengambangkan perekonomian guna membiayai kelangsungan roda dan program kehidupan pesantren. Dengan situasi apapun pesantren, sebagai bagian dari sub kultur masyarakat, tetap eksis walaupun dengan swadaya.[17] Kemampuan Kiai, para ustadz, santri, dan masyarakat sekitar, menjadi kunci utama untuk meneguhkan atau setidaknya meningkatkan kompetensi pesantrem dalam visinya itu.

B. Gambaran Umum Program Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah

Sebagai provinsi lainnya di Indonesia, Jawa Timur memiliki keunikan dan kekhasan. Jawa Timur memiliki karakteristik kemajemukan penduduk yang menjadi modal sosial untuk pembangunan yang bertumpu pada kearifan dan kebijakan lokal. Islam sejatinya menjadi salah satu 'karakter' Jawa Timur yang melekat jika dilihat dari penyebaran agama Islam di Indonesia maupun sejarah perjuangan kemerdekaan negara ini.

---

[16]Soetjipto Wirosardjono, *The Impact of Pesantren in Education an Community Development in Indonesia*, (Berlin: Fredrich-Naumann Stiftung Indonesian Society for Pesantren and Community Development (P3M), and Technical University Berlin, 19987), 218.
[17]Ismail SM, et al. (ed,) *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, XIV.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks Jawa Timur, urgensitas ekonomi syariah implementatif adalah keniscayaan. Hal ini bukan dimaksudkan sekedar membantu pemerintah provinsi dalam menyelesaikan persoalan umat Islam. Tetapi, hakekatnya adalah membantu menyelesaikan persoalan masyarakat Jawa Timur secara umum mengingat jumlah penduduk muslim adalah mayoritas. Hal ini semakin dikuatkan dengan setidaknya tiga fakta.[18]

Pertama, jumlah penduduk muslim Jawa Timur adalah peringkat kedua setelah Jawa Barat. Jumlah penduduk Jawa Timur hingga akhir 2015 sebesar 38.847.561 jiwa dengan sebaran terbesar berturut-turut berasal dari Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Jember, dan Sidoarjo. Merujuk data Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk muslim di Jawa Timur sebanyak 36.113.396 jiwa atau 17,43% dari total penduduk muslim di Indonesia atau 97,19% dari total penduduk Jawa Timur.

Kedua, Jawa Timur adalah kantong organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Meski tidak ada yang bisa memastikan berapa jumlah persisnya, namun diperkirakan jumlah warga Nadhlatul Ulama (NU) di Jawa Timur mencapai lebih dari 60 juta. Meski jumlah warga Muhammadiyah tidak sebanyak warga NU, namun dari 33 wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, Muhammadiyah Jawa Timur dinilai paling militan dalam menjalankan roda organisasi dan unggul dalam kerja-kerja pendidikan, sosial, dan keagamaan.

Ketiga, Jawa Timur memiliki jumlah pesantren terbanyak nomor dua di Indonesia. Menurut Statistik Pendidikan Islam Kementerian Agama 2011-2012,

---

[18]Khairunnisa Musari, *Mencari Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah*, (Jawa Pos Radar Jember, Perspektif, 6 Oktober 2017), 25&35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

populasi pondok pesantren di Jawa Timur selama periode 2011-2012 sebanyak 6.003 atau 22,05% di bawah Jawa Barat yang sebanyak 7.624 atau setara 28% dan di atas Jawa Tengah yang sebanyak 4.276 atau sekitar 15,70% dari total pondok pesantren di Indonesia.

Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah tidak selalu diindikasikan dengan kehadiran lembaga keuangan syariah semata. Lembaga keuangan syariah akan tepat menjadi variabel dalam hal ini. Tetapi bukan itu saja, merujuk pada *maqasid shari'ah* artinya, dalam ruang lingkup luas, ekonomi syariah dapat memiliki beragam variabel/indikator yang membentuk mata rantai sehingga unsur *maqasid shari'ah* termanifestasi di dalamnya. Salah satu tantangan bagi ekonomi syariah adalah menjadikan variabel dalam *maqasid shari'ah* ini menjadi terukur.

Dalam memilih Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah dilakukan penilaian dari usulan-usulan desa yang masuk dari perwakilan IAEI di masing-masing daerah beserta alasan-alasannya itu kemudian dilakukan klasifikasi variabel dan indikator pengukurnya oleh IAEI. Dari proses inilah kemudian disusun draf Arsitektur Desa Berbasis Ekonomi Syariah dengan pilar-pilarnya sebagai wujud variabel. Selanjutnya dilakukan penguatan data dengan memformasi ulang informasi desa sesuai dengan pilar yang telah terbentuk. Dari proses inilah kemudian dilakukan skoring terhadap desa-desa yang diusulkan untuk menemukan indeksnya.

Program ini sangat strategis dalam membumikan ekonomi syariah, utamanya dalam menggerakkan perekonomian desa berbasis sektor riil. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadirnya bank sentral sebagai pengusung dan menjadi garda terdepan, maka ke depan diharapkan dapat dimunculkan desa-desa binaan yang mempertemukan perguruan tinggi, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan *stakeholder* ekonomi syariah untuk bahu-membahu membangun desa mandiri, berdaulat, dan humanis.

Konsep pengembangan desa mandiri telah lama menjadi program pemerintah melalui Badan Pengembangan Desa Mandiri (BPDM). Dalam hal ini, BPDM membantu desa mitra mencapai status desa mandiri dengan indikator-indikator yang terdapat pada indeks desa membangun yang dikeluarkan oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa. Pada dasarnya BPDM hanya merangkum pada bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan dengan tujuan untuk tidak mengubah terlalu dalam bagaimana budaya dan interaksi antar masyarakat desa mitra yang telah ada.

Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah memiki proses *sceening* dalam menetapkan desa sebagai pilot project. Dalam hal ini BI bersama IAEI telah merumuskan 5 pilar Indikator Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah, yakni (1) Potensi Ekonomi, (2) Akses Keuangan, (3) Kelembagaan Masyarakat, (4) Lingkungan Biotis dan Infrastruktur, serta (5) SDM dan Kondisi Sosial.[19]

Kelima pilar di atas masih sangat dinamis dalam merumuskan konsep penilaiannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian dan konsepsi variabel penilaian

[19]disampaiakan pada Focus Group Discussio (FGD); Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah, Grand City, Surabaya, 7 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang relefan dalam Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah yang tanpa meninggalkan kaidah prinsip syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Model Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah

Berikut indikator yang menjadi acuan penilaian desa mandiri berbasis ekonomi syariah yang penulis terjemahkan dengan konsep aplikatif berdasarkan kajian teori maupun konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumya pada pemberdayaan desa mandiri.

1. SDM dan Kondisi Sosial

Sumberdaya adalah suatu yang tersedia dan atau dapat disediakan guna memproduksi sesuatu.[1] Sumberdaya atau *resources*, merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses kegiatan, baik proses produksi komoditi tertentu, proses pengolahan atau perbaiakan nilai tambah *(added value)*, maupun proses Pengembangan Masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan atau mutu hidupnya, lahir dan batin, material dan spiritual, di dunia maupun di akhirat.

Dalam teori manajemen konvensional, yang termasuk sumber daya hanya terbatas pada: man (manusia termasuk pengetahuan, sikap, dan keterampilanya), *money* (uang), material (bahan baku, perlengkapan, dan *machine* (alat, atau mesin)). Tetapi dalam pandangan "manajemen masa kini" yang termasuk dalam sumberdaya telah berkembang menjadi: sumberdaya-alam, sumberdaya manusia (termasuk; modal sosial, kearifan tradisional, kebudayaan, dan modal spiritual), infrastruktur (sarana dan prasarana), kelembagaan (termasuk kelompok/

[1]Ricklefs, 2015 dalam buku Aprillia Theresian, dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi: hukum, peraturan, nilai-nilai). Bahkan informasi, waktu, kemudahan *(facilities)*, aksesibilitas, jejaring *(networking)*. dll.[2]

Pada aspek sumberdaya manusia (SDM) maka sejalan dengan pernyataan di atas, sumberdaya manusia *(human capital)* menempati kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan. Tidak saja sebagai pengelola dan pelaku pembangunan, tetapi pembangunan itu sendiri harus mampu memberikan manfaat dan perbaikan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Itulah sebabnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih jauh penting dari itu adalah perbaikan mutu hidup yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index*, sebagaimana yang dikenalkan oleh Mahbul-ul Haq (1996) yang kemudian dikembangkan oleh Amatya Sen sebagai penerima Hadiah Nobel Ilmu Ekonomi pada tahun 1998.

Sumberdaya Manusia adalah seperangkat kecakapan, pengetahuan, sifat sosial dan kepribadian, termasuk kreativitas, yang terkadung dalam diri manusia yang dapat diupayakan untuk melaksankan kegiatan yang dapat menghasilakan atau memberikan manfaat ekonomi.[3]

Dalam rangka mewujudkan program pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah maka perlu adanya figur kepemimpinan dan pendamping desa. Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang desa adalah penyediaan pendamping desa yang mampu melakukan kerja-kerja pemberdayaan

[2]Ibid, 33.
[3]Ibid, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di masyarakat. Pendamping desa akan menentukan sejauh mana transformasi dari desa lama menjadi desa baru sesuai UU Desa tersebut sukses.

Cakupan kegiatan pendampingan Desa yang diharapkan setidaknya menyangkut 2 (dua) hal, yaitu pengembangan kapasitas teknokratis dan pendidikan politik.[4]

a. Pengembangan Kapasitas Teknokratis

   Mencangkup pengembangan pengetahuan dan keterampilan terhadap para pelaku desa dalam hal pengelolaan perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi, sistem informasi dan sebagainya.

b. Pendidikan Politik

   Cita-cita besar dari pendampingan desa adalahterwujudnya masyarakat yang aktif, kritis, peduli, berdaulat dan bermartabat. Pendampingan ini merupakan sarana kaderisasi pada masyarakat lokal desa agar mampu menjadi penggerak pembangunan dan demokrasi desa. Kaderisasi dilakukan dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan membuka ruang-ruang publik serta akses perjuangan politik untuk kepentingan masyarakat. Politik dalam konteks ini bukan dalam pengertian perebutan kekuasaan melainkan penguatan pengetahuan dan kesadaran akan hak, kepentingan dan kekuasaan mereka, dan organisasi mereka merupakan kekuatan representasi politik untuk berkontestasi mengakses arena dan sumberdaya desa. Pendekatan pendampingan yang berorientasi politik ini

[4]Buku 2 Kepemimpinan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, (Jakarta: Maret 2015), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan memperkuat kuasa rakyat sekaligus membuat sistem desa menjadi lebih demokratis.

Pendamping desa diarahkan untuk mengisi "ruang-ruang kosong" baik secara vertikal maupun horizontal. Mengisi ruang kosong identik dengan membangun "jembatan sosial" *(sosial bridging)* dan "jembatan politik" *(political bridging)*. Pada ranah desa, ruang kosong vertikal adalah kekosongan interaksi dinamis *(disengagement)* antara warga, pemeritah desa, dan lembaga-lembaga desa lainya.[5]

Gambar 4.1

Cakupan Pendampingan Desa

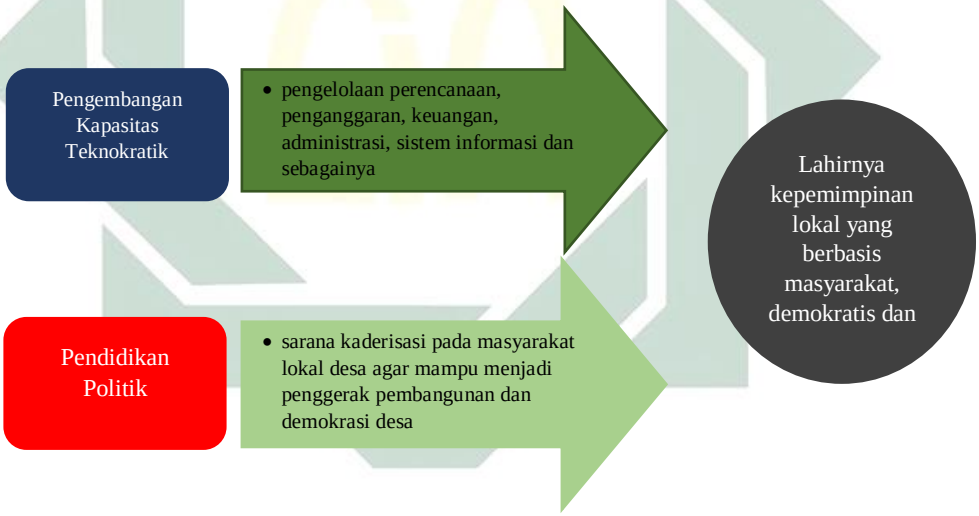

Ruang kosong horizontal biasanya berbentuk kerapatan sosial yang terlalu jauh antara kelompok-kelompok masyarakat yang terikat berdasarkan jalinan parokhial berdasarkan agama, suku, kekerabatan, golongan dan sebagainya. Ikatan sosial berbasis parokhial ini umumnya melemahkan kohesivitas sosial, mengurangi perhatian warga pada isu-isu publik, dan

[5]Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melemahkan tradisi berdesa. Karena itu ruang kosong horizontal perlu dirajut oleh para pendamping agar tradisi berdesa bisa tumbuh dan desa bisa bertenaga secara sosial.

Sedangkan Kondisi sosial ekonomi masyarakat secara sosiologis merupakan bagian integral dari hubungan-hubungan sosial suatu masyarakat. Pengaturan ekonomi tidak bertindak untuk menjaga kepentingan-kepentingan individual terkait dengan kepemilikan barang-barang. Setiap langkah dalam proses ekonomi menyesuaikan dengan beberapa kepentingan sosial, yang merupakan dasar bagi tindakan ekonomi. Oleh karenanya beberapa sistem ekonomi beroperasi atas dasar motif-motif non ekonomi.[6]

Dinamika ekonomi masyarakat pedesaan dipengaruhi pula aspek non ekonomi yang berkaitan dengan budaya, politik dan keagamaan. Beberapa aspek non ekonomi mewarnai corak sistem dan praktik berekonomi. Proses ekonomi menjadi tidak bisa lepas dari persoalan–persoalan sosial budaya, politik dan keagamaan masyarakat. Situasi yang kondusif akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Termasuk juga perubahan–perubahan sistemik dalam aspek ekonomi masyarakat. Dinamika sosial ekonomi pedesaan mempengaruhi sistem ekonomi Islam dalam upayanya memasuki dan mengeser sistem perekonomian yang telah mapan. Komposisi sistem penghidupan masyarakat menjadi faktor penting dari dinamikan sosial ekonomi di pedesaan.

---

[6]M. Taufik Rahman, *Transformasi Besar, Asal Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lingkungan Biotis dan Infrastruktur

Keberlangsungan kegiatan ekonomi adalah bagian dari aktifitas yang berlangsung dalam masyarakat; dalam proses pengembangan tersebut maka aspek lingkungan biotis dan infrastruktur merupakan bagian dari yang harus terpenuhi dalam pembangunan desa mandiri.

Lingkungan merupakan indikator yang berperan penting dalam mengukur kualitas dan respon masyarakat untuk menjaganya, ada dua bidang dalam lingkungan:

a. Lingkungan Fisik

   Lingkungan fisik dimaksudkan adalah tempat tinggal manusia, tempat terjadinya interaksi antar sesama masyarakat. Lingkungan fisik memiliki pengaruh langsung terhadap kelangsungan hidup manusia yang berada di dalamnya. Perlu adanya penjagaan lingkungan pada aspek kebersihan dan kelestariannya agar manusia yang hidup di lingkungan tersebut merasa nyaman dan terlindungi.

b. Lingkungan Sosial

   Lingkungan sosial di sini adalah hubungan fisik dengan masyarakat yang hidup dan berinteraksi di dalamnya. Peran masyarakat dalam menjaga lingkungan sangatlah penting dalam mewujudkan dan menentukan bahwa lingkungan tersebut bersih atau tidak.

Adapun infrastruktur merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau yang dapat menunjang terselenggaranya proses pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah. Tanpa adanya infrastruktur yang mampu dimanfaatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penyelenggraan kegiatan ekonomi maka akan sulit diwujudkanya suatu program kegiatan.

Infrasrtuktur menjadi prioritas pembangunan secara nasional. Dalam melakukan pembangunan saranan dan prasaranan infrastruktur berdasarkan teori Grigg sistem infrastruktur merupakan pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dalam pembangunan infrastruktur desa merupakan suatu proses pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki. Dalam pembangunan perlu adanya tahap perencanaan, secara garis besar perencanaan tersebut meliputi analisis kebututuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya manusia setempat.

Adanya pembangunan infrastruktur dalam Islam memiliki dampak yang positif dan kemaslahatan dalam segi ekonomi maupun sosial. Adanya pembangunan infrastruktur desa yang berdampak pada perekonomian masyarakat pada aspek melakukan pekerjaan dan berdagang sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dalam ekonomi Islam motif dalam aktifitas ekonomi adalah ibadah, sehingga kemudian mempengaruhi segala perilaku aktifitas dalam melakukan konsumsi, produksi dan interaksi ekonomi lainnya.

Apabila dampak pembangunan tersebut memberikan dampak perekonomian yang meningkat maka pembangunan tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan, dalam ekonomi Islam kesejahteraan merupakan adanya rasa aman baik dari segi perasaan, lingkungan dan juga materi. Islam memandang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan.

Gambar 4.2

Orientasi Lingkungan dan Infrastruktur

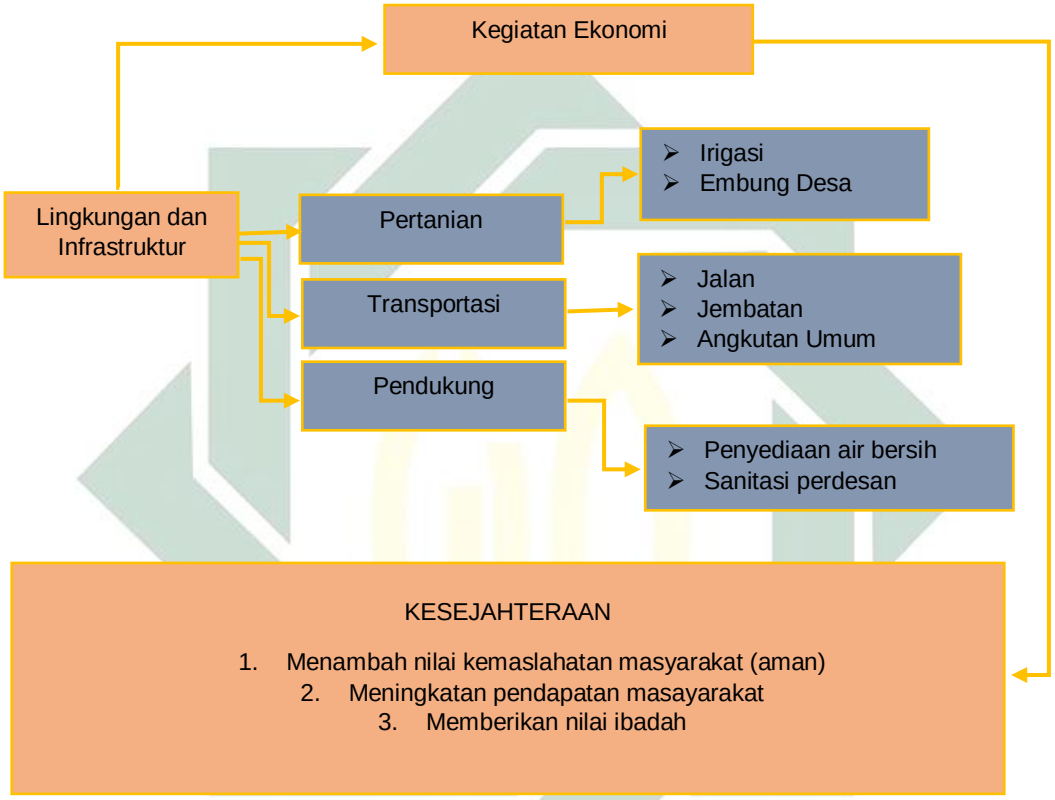

3. Kelembagaan Masyarakat

Dalam sebuah buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang desa mandiri, desa membangun[7] menggambarkan strategi dalam membangun kemandirian desa.

[7]Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Desa Mandiri, Desa Membangun, Buku 5* (Maret, 2015), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.3
Membangun Kapasitas Warga

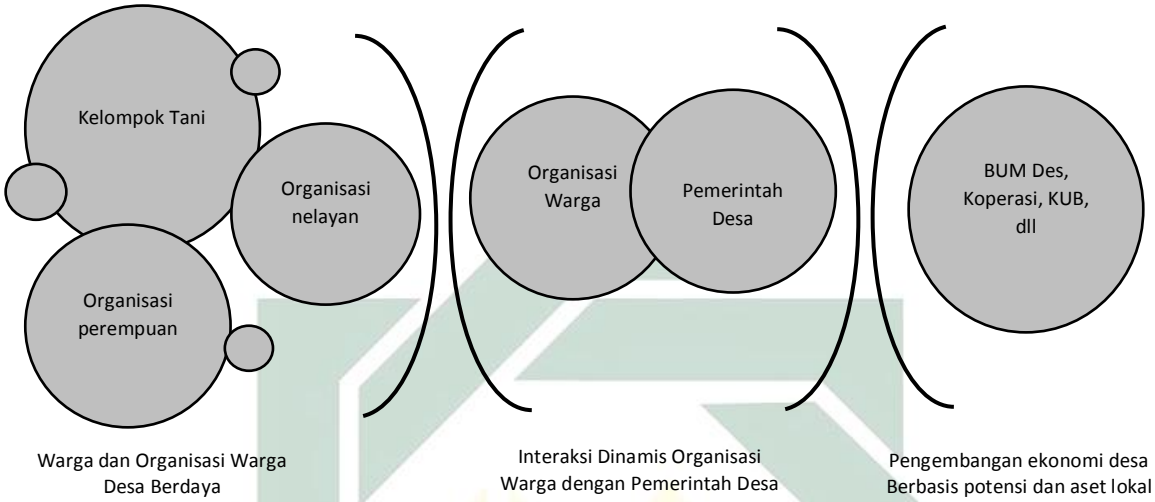

Dari gambar di atas merupakan proses membangunan kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis, dalam proses ini biasanya akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif mayarakat.

Tanpa harus menunggu dipicu oleh munculnya konflik sosial, di desa sebenarnya sudah banyak lembaga-lebaga sosial kemasyarakatan. Secara umum terbagi dalam dua jenis, lembaga korporatis dan non korporatis. Lembaga korporatis identik dengan organisasi masyarakat desa yang dibentuk oleh negara. Contohnya, PKK, Karang Taruna, LKMD, Hansip, dan kelompok tani, kelompok nelayan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang akhir-akhir ini menjamur seiring masuknya program masuk desa dari kementrian/lembaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara yang non korporatis adalah organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat. Contohnya majelis taklim, organisasi adat dan kelompok seni rakyat. Agar semua lembaga kemasyarakat tersebut aktif maka perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Gambar 4.4

Langkah Pengorganisasian Lembaga Masyarakat

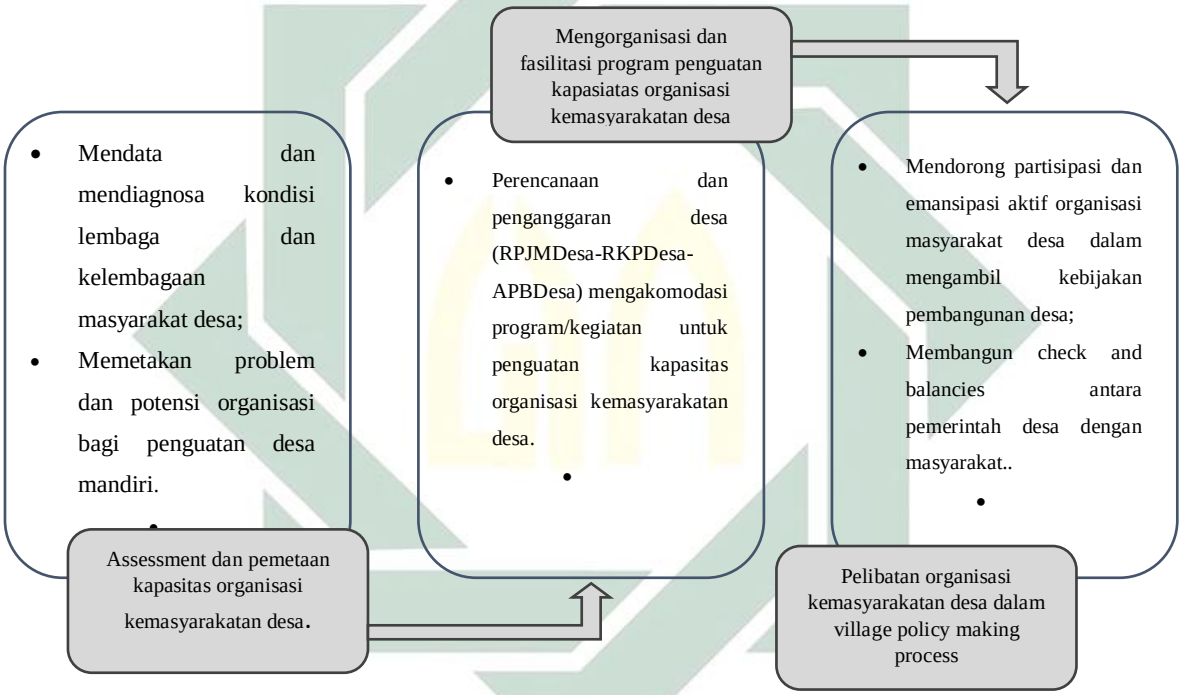

Dalam tabel langkah tersebut dimaksudkan agar pemerintah desa mempunyai data terkait jumlah, dan organisasi kemasyarakatan desa yang masih aktif dan pasif. Dan kemudian akan diketahui baseline data tentang apa saja masalah dan potensi yang dimiliki organisasi kemasyarakatan desa sehingga memungkinkan menjadi mitra strategi pemerintah desa dalam menjalankan mandat pengembangan desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil pemetaan tersebut menjadi acuan pemerintah desa untuk membuat strategi kebijakan dan program desa untuk menguatkan peran organisasi kemasyarakatan desa dengan mengakomodasi program/kegiatan penguatan kapasiatas organisasi kemasyarakatan desa ke dalam dokumen perauran desa tentang RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa. Bentuk kegiatan tersebut dapat berupa pelatihan manajemen organisasi, mendorong restrukturisasi pengurus organisasi, atau pemberian bantuan desa untuk organisasi tersebut.

Pelibatan organisasi kemasyarakatan desa dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik yang diselanggarakan pemerintah desa guna membangun kesadaran bersama sebagai entitas, desa tidak hanya terdiri dari pemerintah desa, tapi ada element masyarkat yang salah satunya terwakili melalui lebaga-lembaga kemasyarakatan desa. Di samping itu salah satu salah satu yang menjamin peran dinamis organisasi masyarakat sipil di desa adalah pelibatan mereka ke dalam arena perumusan dan pengambilan kebijakan desa. Melalui cara ini, secara tidak langsung pemerintah desa telah mengedepankan prinsip penghormatan, partisipasi dan emansipasi warga dalam pembangunan. Dari sinilah nanti akan lahir proses *chek and balencies* dalam penyelanggaraan pemerintah desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.5

Tata Kelola Desa

4. Potensi Ekonomi

Potensi Ekonomi dalam pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah merupakan bagian yang menjadi kekuatan dalam perjalanan pengambanganya. Kita dapat melihat bagaimana potensi pertanian, industri, dan potensi wisata yang ada pada desa tersebut.

Sebagai model pengukuran potensi ekonomi suatu desa maka dibawah ini kita lihat indikator-indikator desa mandiri yang telah dirumuskan BPDM dalam membantu desa mandiri;[8]

[8]Kretria desa mandiri berdasarkan Badan Pengembangan Desa Mandiri (BPMD), Permendes Nomor 2 Tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Setiap individu di luar pemerintahan desa yang telah menyelesaikan studi 12 tahun atau berada pada usia kerja terlibat minimal satu jenis kegiatan ekonomi yang dikelola individu, kelompok, atau pemerintah desa;
b. Terdapatnya area pusat ekonomi terpadu (pertokoan, perkantoran, pasar permanen dan pasar semipermanen) yang dapat diakses dan atau dimanfaatkan oleh setiap warga desa;
c. Adanya fasilitas pos dan jasa logistik yang dapat diakses seluruh warga;
d. Tersedianya badan usaha permodalan dengan bunga rendah yang yang dapat dimanfaatkan seluruh warga desa yang memiliki kapasitas dalam mengembalikan kredit;
e. Terdapat badan konsultasi permodalan rakyat yang memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga desa;
f. Adanya akses jalan yang layak serta transportasi yang menghubungkan desa dengan pusat kegiatan ekonomi, pemerintah, serta logistik pada tingkat kecamatan.

Ke enam indikator pencapaian desa mandiri di bidang ekonomi di atas merupakan bagian yang dapat kita jadikan acuan dalam mengukur atau membuat konsep desa mandiri.

Pada fokus penelitian tentang Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah maka perlu adanya keberlangsungan kegiatan di bidang ekonomi syariah yakni:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Keuangan Syariah

Laju pertumbuhan ekonomi masyarakat secara tidak langsung juga berpengaruh pada pasar keuangan syariah. Munculnya kesadaran kolektif terhadap ekonomi umat yang mengacu prinsip syariah secara langsung menjadi acuan terhadap potensi besar dari pasar yang ada.

b. Wisata Religi

Potensi Islami yang juga tidak dapat diabaikan adalah minat wisata religi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya dipengarhi oleh pasar yang memang sangat besar, tapi juga dukungan berbagai pihak tentang penyelenggaraan wisata religi. Hal ini menegaskan potensi wisata religi perlu digarap dengan serius, sehingga mampu mengembangkan potensi ekonomi domestik untuk memacu penerimaan asli daerah (PAD) dan Kemandirian.

c. Industri (Fashion Islami)

Kebutuhan sandang juga menjadi potensi ekonomi yang sangat besar dari geliat ekonomi Islam. Setidaknya, asumsinya penduduk dan minat serta daya tarik fashion itu sendiri. Fenomena ini juga didukung oleh perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan. Artinya, kebutuhan terhadap fashion Islami menjadi peluang yang sangat menjajikan. Oleh karena itu, muncul kesadaran kolektif terhadap hijab juga menjadi pasar yang menarik dicermati. Realitas ini secara tidak langsung menegaskan bahwa industri fashion Islami menjadi potensi riil dari geliat pasar ekonomi Islam secara Makro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Akses keuangan

Pada pilar kelima ini menjadi acuan yang sangat mendasar, sebab akses merupakan bagian dari ukuran kegiatan ekonomi masyarakat tersebut. Sebagai acuan penilaian desa mandiri berbasis ekonomi syariah maka kita harus melihat sejauh mana masyarakat telah melakukan transaksi/aktifitas yang sesuai prinsip syaraiah. Adanya lebaga keuangan syaraih seperti bank maupun non bank menjadi pendukung dalam mengukur akses keuangan masyarakat desa.

Dalam hal ini ada skema usulan yang dibuat oleh bapak Taufik Saleh Deputi Direktur Bidang Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia Jawa Timur sebagai berikut:[9]

[9]Draf skema usulan penyempurnaan scoring, contoh detailing pilar akses keuangan, disampaiakan pada Focus Group Discussio (FGD); Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah, Grand City, Surabaya, 7 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.6

Contoh Detailing Pilar Akses Keuangan

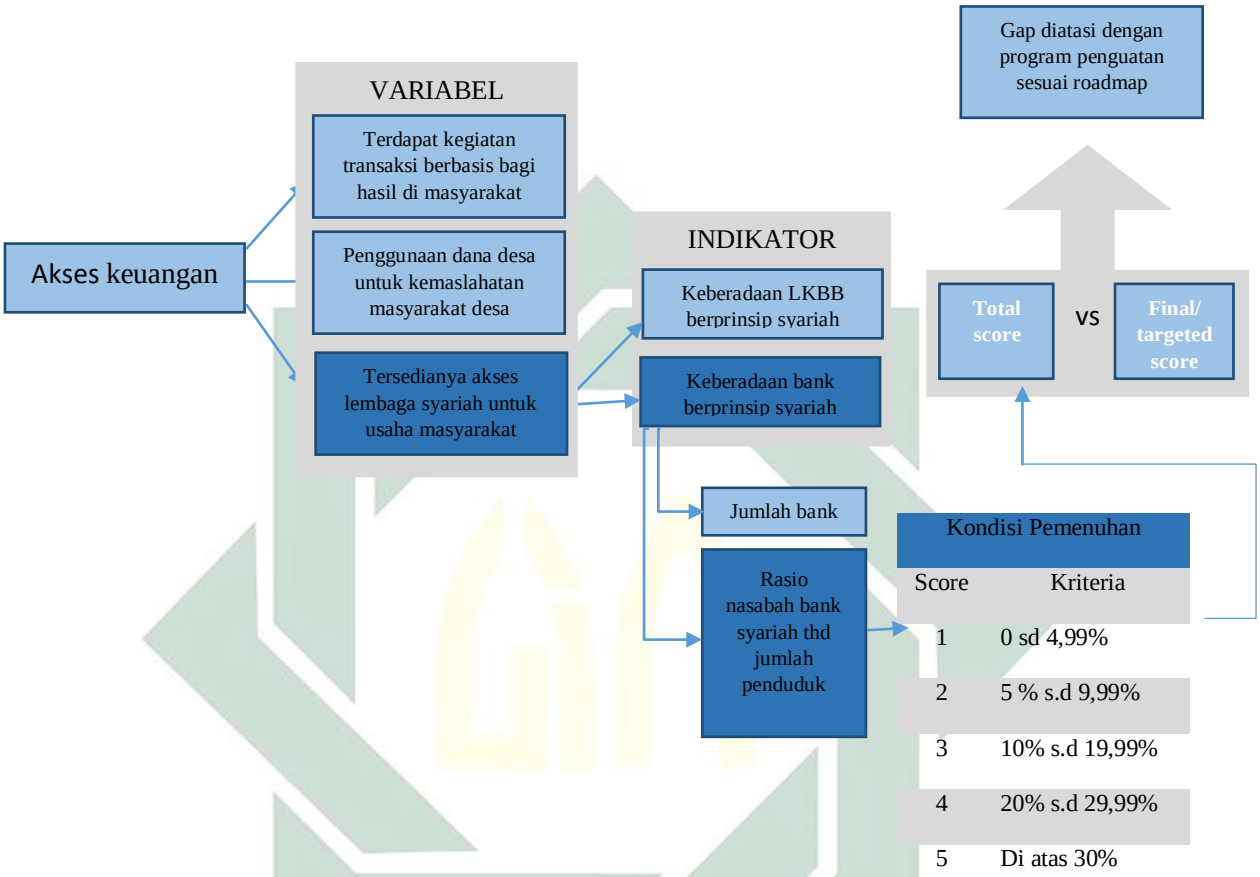

Skema di atas memerlukan pemikiran dan pembahasan yang mendalam, serta kesepakatan terhadap indikator-indikator yang akan digunakan. Dalam bentuk yang lengkap nantinya, skema tersebut dapat menjadi Indikator Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah (IDMBES) yang diharapkan dapat menjadi alat ukur yang berguna untuk menilai kinerja ekonomi dan keuangan syariah di level desa. Alat tersebut juga diharapkan dapat menjadi pemicu untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah di Desa Syariah Cukir Kabupaten Jombang

Program Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah merupakan program pemberdayaan serta pengembangan desa yang digagas oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jawa Timur. Dalam prosesnya telah dirumuskan indikator/pilar penialaian pemilihan desa yang diajukan sebagai *pilot project.* Ada 5 pilar/indikator yang telah ditetapkan dan indikator.

Berangkat dari misi Pengembangan Desa Berbasis Ekonomi Syariah yang merupakan bentuk dari semangat membumikan al-Qur'an pada aspek kegiatan muamalah yang berdasarkan prinsip syariah, maka potensi ekonomi ini menjadi penting sebagai indikator subjek dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Tentu saja dalam melakukan penilaian terhadap potensi ekonomi tidak hanya persoalan yang sifatnya duniawi, tetapi juga nilai-nilai aplikatif dari *Hablum minallah* yang berbanding positif dengan *Hablum minannas*. Sehingga ukuran kualitas dan kuantitas potensi ekonomi adalah ketika mampu menyelaraskan antara tauhid Ilahiah dengan tauhid sosialnya, yang mana keduanya bermuara pada pencarian ridaNya.

Potensi ekonomi dalam pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah merupakan bagian yang menjadi kekuatan dalam perjalanan pengambanganya. Kita dapat melihat bagaimana potensi pertanian, industri, dan potensi wisata yang ada pada desa tersebut. Pada aspek ini maka dapat kita lihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabulasi potensi ekonomi pendapatan perkapita keluarga di Desa Syariah Cukir berikut ini:

Tabel 4.7

Pendapatan Perkapita

No	Bidang	Jumlah RT	Jumlah Anggota RT	Jumlah RT buruh tani	Jumlah anggota RT buruh	Pendapatan perkapita
1	Pertanian	83	302	102	240	1.750.000
2	Perkebunan	89	197	87	206	2.150.000
3	Peternakan	75	325	26	75	1.950.000
4	Perikanan	25	84	15	55	1.500.000
5	Kerajinan	349	945	176	321	3.500.000
6	Indusrei Kecil, menengah dan besar	325	986	59	175	2.400.000
7	Jasa dan perdagangan	575	1600	375	1200	2.500.000
Rata-rata pendapatan perkapita						2.250.000

Dalam perhitungan rata-rata pendapatan perkapita dari semua sektor mata pencaharian warga di Desa Syariah Cukir mencapai 99% dari Upah Minimum Regional Kab. Jombang sebesar Rp 2.264.135,00. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Desa Syariah Cukir telah memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan oleh pemerintah.Sehingga pada aspek ekonomi masyarakat Desa Syariah Cukir, dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri.

Pada sektor pariwisata yang merupakan salah satu pemompa kemajuan ekonomi suatu daerah selain kemajuan dalam bidang bisnis dan perbankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pariwisata tentu sangatlah penting bagi ekonomi sebuah daerah karena keberadaannya menambah lahan bisnis bagi masyarakat sekitar. Bisnis tersebut akan semakin beragam menyesuaikan kondisi dan kebutuhan tempat wisata tersebut. Sepertihalnya cindramata, penginapan, tempat kuliner, transportasi, dan jasa lain yang mendukung fasilitas wisata yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam mengatur setiap aktifitas yang dilakukan terlebih dalam bidang ekonomi (muamalah), jadi sektor wisatapun menjadi lahan bisnis yang telah diatur batasan-batasanya oleh Islam. Hal tersebut disebabkan pengaruh pariwisata terhadap kehidupan ekonomi, budaya dan sosial bahkan pada aspek keberagamaan.

Desa Syariah Cukir memiliki potensi wisata religi[10] atau sejarah yakni makam mantan Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid di Pondok Pesantren Tebuireng, Desa Syariah Cukir, Kab. Jombang, Jawa Timur. Jumlah pengunjung dari tahun ke tahun semakin banyak, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pengurus Pondok Pesantren Tebuireng[11] bahwa jumlah pengunjung setiap hari sudah di atas 3.000 orang peziarah yang datang, dan meningkat pada setiap Sabtu dan Minggu, mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Timur bahkan daerah di Indonesia yang datang menggunakan mobil atau rombongan dengan Bus terkadang mereka yang datang adalah rombongan wisata religi wali-wali.

[10]Wisata religi merupakan salah satu jenis produk wisata yang berkaitan erat dengan religi atau keagamaan yang dianut oleh manusia. Wisata religi dimaknai sebagai kegiatan wisata ketempat yang memiliki makna khusus bagi umat beragama, biasanya berupa tempat ibadah, makam ulama, atau situs-situs kuno yang memiliki kelebihan (sisi sejarah, adanya mitos atau legenda, keunikan dan keunggulan pada bidang arsitekur bangunan)

[11]Pengurus Pesantren, *Wawancara*, Jombang, Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di makam pesantren Tebuireng selain ada makam KH. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, juga ada makan pendiri Organisasi Islam terbesar di Indonesia (Nahdlatul Ulama) yakni KH. Hasyim Asy'ari, serta ayahandanya yang juga tokoh nasional KH. Wahid Hasyim. Selain itu, sejumlah Kiai dan keluarga juga dimakamkan di lokasi tersebut.

Dengan adanya tempat tesebut maka dapat mendukung roda perekonomian warga setempat maupun pesantren bahkan Desa meningkat dengan memanfaakan fasilitas pusat kuliner dan oleh-oleh. Bahkan warga dapat menjual jasa seperti kamar mandi, sebab fasilitas yang ada di pemakaman sangatlah terbatas jika peziarah membludak dimomen-momen khusus seperti pada maulid Nabi, Isra' dan mi'raj maupun Ramadhan.

> Salah satu pedangan mengatakan: "*dengan adanya makam Gus Dur di Tebuireng ini membuat banyak pengunjung berdatangan, sehingga menjadi berkah tersendiri bagi kami untuk mengais rizki dengan berdagang".*[12]

Selain adanya berkah pada bidang ekonomi, adanya pesantren Tebuireng, terlebih lagi setelah adanya makam Presiden ke-empat Indonesia yaitu KH Abdurrahman Wahid yang diletakkan di lingkungan pesantren. Masyarakat juga dapat membangun kehidupan sosialnya dengan saling berinteraksi dengan sesama pedagang, pembeli dan pihak pondok pesantren/pengelola.

Pedagang di sekitar makam Gus Dur memiliki sistem perdangan yang cukup baik, karena dengan kesadaran pedangan sendiri maka dibuatlah paguyuban-paguyuban untuk mengatur penjual di sekitar makam Gus Dur untuk

[12]Wadhi, *Wawancara*, Jombang, 05 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan perekonomian masyarakat yang berbudaya Islami, ada empat paguyuban yang mengatur pedagang di sekitar warga yang meliputi Listrik, Toko-toko penjualan, Kebersihan dan Keamanan.

Perdangan di sekitar makam Gus Dur juga tidak luput dari pengaruh pondok pesantren karena nilai-nilai atau tradisi di dalam pondok pesantren sangat berpengaruh, seperti bersifat sopan kepada pembeli, mendahulukan kenyaman pembeli, tidak mengambil keuntungan yang berlebih dalam pekerjaan, pedagang selalu memperhatikan kesejahteraan bersama untuk membangun kehidupan sosial ekonomi.

Pada aspek itulah selain nilai-nilai Islami dalam kegiatan ekonomi diterapkan, hal ini merupakan bagian dari indikator kesejahteraan dalam Islam yang memenuhi sistem nilai Islam, kekuatan ekonomi perdagangan dan keamanan serta ketertiban sosial. Sehingga aktifitas ekonomi yang berada dikawasan wisata akan mendidik masyarakat untuk mewujudkan desa yang mandiri dengan prinsip-prinsip syariah.

Desa Syariah Cukir yang notabenenya berada dikawasan Pesantren Tebuireng dan juga berada dikawasan industri pabrik gula peninggalan Belanda sehingga memiliki aktifitas ekonomi yang cenderung tinggi, oleh karena itu kehadiran lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank menjadi oase dalam segala aktifitas yang ada di Desa Syariah Cukir secara keseluruhan. Adanya pasar Cukir yang merupakan pasar Induk di kecamatan Diwek menjadi salah satu potensi perputaran kegiatan ekonomi yang sangat baik. Dalam konteks

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini maka masyarakat haruslah mampu dan memiliki akses keuangan yang mendukung dalam segala aspek kegiatan ekonomi tersebut.

Merujuk pada skema konsep akses keuangan yang telah dibuat oleh bapak Taufik Saleh, maka dapat kita gambarkan bagaimana kondisi masyarakat Desa Syariah Cukir dalam menerima kemudahan mengakses keuangan yang sesuai prinsip syariah. Pada salah satu indikator yang menjadi acuan adalah tersedianya akses lembaga keuangan syariah untuk usaha masyarakat. Hal ini merupakan indikator yang sangat menentukan arah karakteristik Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah.

Di Desa Syariah Cukir saat ini telah berdiri beberapa lembaga keuangan syariah maupun non syariah, Lembaga Keuangan Bank maupun non Bank, hal ini menjadi sebuah indikator besarnya potensi pasar keuangan di Desa Syariah Cukir. Di antara lembaga keuangan tersebut adalah:

1. BMT Mu'amalah Syariah di Jl. Gerilya No.65 Cukir, Diwek
2. BMT Darul Falah di Jl. Cukir Gang Masjid No. 15 Cukir, Diwek
3. BMT Maslahah di Jl Masjid Gg 1 RT/RW 08/03 Cukir, Diwek

Dari ketiga lembaga keuangan di atas telah kami dapatkan data jumlah nasabah yang ada di Desa Syariah Cukir yakni sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.8

Jumlah Nasabah Lembaga Keuangan Syariah

No	LKS	Jumlah	Nasabah Pembiayaan Usaha
1	BMT Mu'amalah Syariah	740	260
2	Darul Falah	983	252
3	Maslahah	861	256
Jumlah		**2584**	**768**

Dari tiga lembaga keuangan syariah di atas maka dapat kita ketahui rasio partisipasi masyarakat Desa Syariah Cukir untuk mengkases keuangan syariah adalah 1:3 atau 31% dari jumlah penduduk keseluruhan. Mereka yang memanfaatkan lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan usaha adalah 1:11 atau 9% dari keseluruhan jumlah penduduk. Jika melihat **gambar 4.6** maka rasio tersebut sudah memenuhi kriteria indikator akses keuangan syariah yang menjadi pilar Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah.

Salah satu lembaga keuangan syariah di atas yakni BMT Mu'amalah Syariah memiliki program pengembangan dan membina usaha kecil melalui bantuan modal dan pembinaan usaha, sehingga kegiatan usaha kecil ke bawah dapat berkembang maju dan mandiri, serta mampu mengangkat dan memulihkan perekonomian dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Wujud pembinaan usaha adalah memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada pengusaha kecil, agar mampu untuk mengembangkan kreatifitas yang dimiliki. Selain pada aspek kreatifitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT Mu'amalah juga berupaya meningkatkan kualitas SDM, memberikan layanan konsultasi usaha dan motivasi.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Ekonomi Syariah

Faktor pendukung dipahami sebagai kondisi yang memperkuat penyelenggaraan sebuah program pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah. Berdasarkan temuan dilapangan, faktor yang mendukung yaitu:

1. Dukungan dari pemerintah desa yang menyertai dan mengawal program, dan berusaha memfasilitasi terselenggaranya program tersebut;
2. Dukungan dari masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam hal ikut berperan serta dalam program tersebut dengan menerima masukan dan model pengembangan pada aspek ekonomi syariah.
3. Lingkungan dengan kesadaran beragama Islam yang cukup besar dengan adanya salah satu pesantren tertua di Jawa Timur;
4. Terdapat Perguruan Tinggi UNHASY yang dapat dijadikan relasi kerja/ atau pelaksana di Lapangan dalam pelaksanaan program pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah.

Faktor penghambat yang ditemukan dilapangan dalam pelaksanaan sebuah program pasti akan ditemukanya sebuah kendala-kendala dalam pelaksanaannya, dalam hal ini pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah yang merupakan program besar yang digagas oleh BI dan melibatkan IAEI merupakan rangkaian sebuah program secara menyeluruh di Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Syariah Cukir sendiri menjadi desa dengan nilai yang cukup tinggi; namun pasca penilaian yang dilakukan oleh BI dan IAEI belum adanya tindak lanjut dalam pelaksanaanya, adapun faktor yang melatarbelakanginya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pendamping lapangan dalam pelaksanaan program tersebut;
2. Tidak ada kerjasama yang baik antara pemilik kebijakan program dengan perguruan tinggi setempat maupun pesantren;
3. Kurangnya komunikasi antara pejabat pemilik kebijakan program dengan pemerintah desa maupun kabupaten dalam hal ini LKMD;

Selain hal tersebut di atas, program ini memiliki aspek yang mendukung, sehingga program ini akan terlaksana dengan baik, yaitu:

1. Desa Syariah Cukir merupakan desa dengan ruang lingkup pesantren, sehingga pemahaman masyarakat terkait dengan keagamaan sangat baik.
2. Mudahnya akses keuangan yang ada di Desa Syariah Cukir dengan berdirinya lembaga keuangan syariah;
3. Peran strategis pemerintah desa yang mendukung penuh adanya program pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsep pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah adalah bagian dari aktualisasi prinsip-prinsip syariah kedalam 5 pilar pengembangan desa tersebut, yakni (1) SDM dan Kondisi sosial (2) Lingkungan biotis dan infrastruktur (3) Kelembagaan Masyarakat (4) Kondisi Ekonomi (5) Akses Keuangan. Merujuk kepada konsep yang mempelajari dan menganalisis proses pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengidentifikasi dan merekomendasikan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah Salallahu alaihi wassalam. Konsepsi sosial-keagamaan menjadi penguat bahwa perilaku ekonomi kaum Muslim pada hakekatnya adalah manifestasi pengalaman dalam mengaktualisasikan ajaran agama. Oleh karena itu, dalam mencapai suatu kebahagiaan hidup tidak hanya memperhatikan suatu perhitungan untung dan rugi.
2. Desa Syariah Cukir memiliki potensi pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah, sebagaimana yang telah ada, pada aspek kegiatan ekonomi, Desa Syariah Cukir memiliki wisata religi yang aktifitas perdaganganya telah mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam transaksi maupun dalam interaksi sosialnya. Dalam akses keuangan Desa Syariah Cukir sangatlah mudah mengakses lembaga keuangan syariah yang mampu memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permodalan dalam usaha masyarakat sekitar dan beberapa program pemberdayaan desa. Pada kondisi sosial Desa Syariah Cukir yang mayoritas adalah warga beragama Islam dan merupakan kawasan yang didalamnya ada sebuah pesantren yang memiliki nilai historis pada aspek religi dengan pengaruh yang kuat terhadap masyarakat sekitar sehingga nilai-nilai Islam yang ada di dalam pesantren memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada masyarakat sekitar melalui interaksi sosial.

B. Implikasi Teoritik

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat dikemukakan implikasi secara teoritis sebagai berikut:

1. Penempatan konsep pengembangan desa mandiri yang berbasis ekonomi syariah menjadi terobosan baru dalam mengambangkan sebuah wilayah pedesaan dengan tinjauan interkasi sosial, penyebaran ekonomi yang merata dan penguatan nilai-nilai religiusitas sebagai dasar dalam menjalankan aktifitas muamalah dan menjadi tujuan akhir dalam menghantarkan pada hubungan secara vertikal kepada Allah SWT.
2. Potensi desa mandiri berbasis ekonomi syariah menjadi penting untuk digali sebagai upaya pemahaman masyarakat atas aktifitas yang dilakukan dalam interaksi sosial agar apa yang menjadi kegiatan masyarakat benar-benar telah berada pada aktualisasi prinsip syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Keterbatasan Studi

Dalam penelitian ini penulis sadar banyak terdapat kekurangan, sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menstimulus untuk lahirnya karya-karya berikutnya yang menyempurnakan dari penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah terkait segi tujuan penelitian ini yang hanya memotret secara global konsep pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah, waktu penelitian yang relatif singkat dalam kacamata penelitian kualitatif, sehingga memberikan efek pada kurang tajam dalam menganalisa fenomena sosial yang mengelilingi program pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah.

D. Rekomendasi

1. Berkaitan dengan program pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah ini, dalam rangka mengembangkan desa mandiri diperlukan manajemen yang lebih rapi serta tenaga pendamping mitra binaan yang ahli di bidangnya. Sehingga diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada di pedesaan.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan program pengembangan desa mandiri berbasis ekonomi syariah maka perlu merangkul pihak-pihak lain dalam mengerjakan preyek sosial tersebut. Baik melalui kerjasama sebagai tenaga ahli dibidang skill, dalam hal pendanaan (*funding)* baik dari pihak bank maupun non bank yang menstimulus peningkatan usaha masyarakat dengan melakuakn aktifitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 1, ter. Soerojo dan Nastangin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Annahar, Nasrun. Dkk, *Sejahtera Dari Desa: Refleksi Pemberdayaan Berbasis Potensi Pertanian*. Malang: Averroes Press, 2017.

Aula, 03 Tahun XXXVIII/Maret 2016.

Azizy, A. Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Baidhawy, Zakiyuddin, *Teologi Neo Al-Maun: Manifesto Islam Menghadapi Globalisasi Kemiskinan Abad 21*. Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2009.

Barro, Robert dan Joshua Mitchell. *Relgious Faith and Economic Growth: What Metters most- Belief Or Belonging?*. Washington DC: The Heritage Foundation Center For Religion and Civil Society, 2004.

Beik, Irfan Syauqi. dan Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Castle, Lence. *Religion, Politics and Economic Behavior in Java: The Kudus Cigarette Industry.* New Haven: Southest Asia Studies, Yale University Press, 1967.

Chulsum, Umi. Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesi; Edisi Terbaru.* Surabaya: Kashiko Publisher, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Damanhuri, Didin S. "*Global Sistem Ekonomi Dan Model Pembangunan Yang Ber Keadilan Sosial (Revitalisasi Maqosid Syariah Di Tengah-Tengah Hegemoni Ekonomi Konvensional), Di Dunia Dan Di Indonesia*". Makalah-IE FEM IPB, 2013.

Ditjen PMD. *Direktorat Pemerintah Desa dan Keluarahan "Naskah Akademik RUU Tetang Desa"*. Jakarta: Depdagri, 2007.

Djakfar, Muhammad. *Wacana Teologi Ekonomi; Membumikan Titah di Ranah Bisnis dalam Era Globalisasi.*Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2015.

Eko,Sutoro. *Desa Membangun Indonesia.* Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014.

El-Diwany, Tarek. *The Problem With Interest: Sistem Bunga dan Permasalahnya, ter. Amdiar Amir.* Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.

Fealy, Freg. Greg Barton. *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdatul Ulama-Ulama.* Yogyakarta: LKIS, 1997.

Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Diterjemahkan oleh Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

Huraerah, Abu. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora, 2008.

Husain, Machnun. *Etika Pembangunan Dalam Pemikiran Islam di Indonesia,*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Hutomo, Mardi Yatmo. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi; Tinjauan Teoritik dan Imlementasi*. Naskah No. 20 Juni-Juli 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indriyani, Ni Putu, dkk. *Analisis Pembangunan Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat.* Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana.

Irawan, Nata. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*.Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Ismail SM. *Dinamika Pesantren dan Madrasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Jarkom Fatwa. *Sekilas Nahdlatut Tujjar*. Yogyakarta: LKIS, 2004.

Juhaya S., Pradja. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Junaidi, Mahbub. "Evaluasi Pelaksanaan (BUMDES) Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Syariah Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi", *AL-Iqtishadi*, Vol. 2, No. 1, Oktober, 2015.

Kertajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*. Bandung: Mizan, 2006.

Kleden, Ignas. *Kapitalis, Spiritualitas Keagamaan, dan Etos Ekonomi: mengenang 100 Tahun The Protestan Ethic And The Spirit of Capitalism Max Weber".* Makalah tidak diterbitkan, Jakarta, 2005.

Komaruddin. *Management Berdasarkan Sasaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Kuntowijoyo. Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi. Bandung: Mizan, 2008.

Kurniawan, Muchamad Mirsa. Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah", *Al-Daulah*, Vol.6, No. 2. Oktober, 2016.

Kusmanto, Thohir Yuli. Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan di Pedesaan. *Jurnal Ilmu Dakwah,* Vol.34, No.2, Juli-Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lombard, Denys A. *Nusa Jawa: Silang Budaya III-Warisan Kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Mahfudz. "Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakan dan Kelembagaan Desa*". Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vo.5, No. 1, 2009.

Majalah Al-Kisah No.03 tahun VI 28 Januari 2008.

Majalah Bangkit. Edisi 03/TH.IV/ Maret 2015.

Malik, M. Luthfi. *Etos Kerja, Pasar dan Masjid: Transformasi Sosial-Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan*. Jakarta: LP3ES, 2013.

Mansyur, Wasid. *Biografi Kiai Ahmad Dahlan* Ahyad. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.

Mardikanto, Totok. Dan Poerwoko Soebianto. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung: Rineka Cipta, 2000.

Misanan, Munrokhim. dkk. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mubyarto, dkk. *Duapuluh Tahun Penelitian Pedesaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 1993.

Mulyadi, Sukidi. Ahmad Dahlan Sebagai Muslim Calvinis, "Dalam Degradasi Ekonomi Muhammadiyah, 'Sebuah Gugatan, Dalam *Equilibrium Jurnal Ekonomi Dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 3 (2005).

Munrokhim dkk, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nafidah, Lina Nasihatun. Mawar Suryaningtyas. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 1, Juni, 2015.

Nakamura, Mitsuo. *Bulan Sabit Terbit Di Atas Pohon Beringin: Studi Tentang Pergerakan Muhammadiyah Di Kotagede Sekitar 1910-2010*, Edisi Revisi Ditambah Bagian Kedua. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017.

Nawawi, Ismail. *Pembangunan Dalam Perspektif Islam Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Surabaya: PMN, 2008.

Nizar, Muhammad. "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) DI Masjid Syarif Hidayatullah Karangploso Malang", *Malia*, Vol. 8, No. 1 (Desember. 2016).

Noer, Delier. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 1995.

Polanyi, Karl. terjemahan. M. Taufik Rahman.*Transformasi Besar, Asal Usul Politik dan Ekonomi Zaman Sekarang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Pradja. Juhaya S. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Rahardjo, Dawam. *Ensiklopedi Al Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiyowati, Arin. Analisis Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan Terhadap Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) Pasca Penutupan Lokalisasi Dupak Bangunsari Dan Tambak Asri Surabaya Tahun 2014. *Tesis* - - UGM, Jogjakarta, 2014.

Sidarta, Wayan. *Manjemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1999.

Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat; mungkinkah muncul antitesisnya?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Sofianto, Arif. "Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan di Kabumen dan Pekalongan", *Matra Pembaruan*, Vol.1, No. 1, Maret, 2017.

Sosis, Richard. Does Religion Promote Trust? The role of signaling, reputation, and punishment," dalam Interdisiplinary Journal Of Research On Religion 1, 2005, dalam M Lutfi Malik, *Etos Kerja, Pasar dan Masjid: Transformasi Sosial-Keagamaan dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan*. Jakarta: LP3ES, 2013.

Sriharini. "Warung Beres Sebagai Modal Sosial Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Umat". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vo. 1, No. 1, Yogyakarta, 2017.

Subagyo. *Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam pemberdayaan Masarakat Pedesaan*. Yogyakarta: UGM, 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Airlangga, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suharto, Didik G. *Membangun Kemandirian Desa, Perbandingan UU No.5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No.6/2004*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Suharyanto. Arif Sofianto. "Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif Di Jawa Tengah". *Jurnal Bina Praja*, Vol. 4, No. 4, Desember, 2012.

Sukmaniar. Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami Di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Tesis—Unversitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Sulistyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Bandung: Refika Aditama, 2004.

Supardjan, Syafar. Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pembiayaan Mikro (Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro pada Anggota Koperasi Baytul Ikhiar, Kabupaten Bogor-Jawa Timur). *Tesis*—Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Suti. *Aspek Sikap Mental Dalam Manajemen SDM*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Theresian, Aprillia. dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.

Umar, Husein. *Desain Penelitian Manajemen Trategik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Utomo, Tri. *Beberapa Permasalahan Dan Upaya Akselerasi Program Pemberdayaan Masyarakat*. 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wirosardjono, Soetjipto. *The Impact of Pesantren in education an Community Development in Indonesia.* Berlin: Fredrich-Naumann Stiftung Indonesian Society for Pesantren and Community Development (P3M), and Technical University Berlin, 1987.

Zainal, Viethzal Rivai dkk. *Islamic Managemen: Meraih Sukses Melalui Praktik Manajemen Gaya Rasulullah Secara Istiqomah*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE, 2013.

Zakiyuddin, Baidhawy. *Teologi Neo Al-Maun: Manifesto Islam Menghadapi Globalisasi Kemiskinan Abad 21*. Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2009.

Zid, Muhammad. Ahmad Tarmiji Alkhudri. *Sosiologi Pedesaan Teoritis dan Perkembangan Kajian Pedesaan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id